



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VI DPRRI DENGAN DIRUT
PT KIMIA FARMA, DIRUT PT BIO FARMA, DAN DIRUT PT INDOFARMA**

- Tahun Sidang : 2020-2021
- Masa Persidangan : V
- Rapat Ke- : ...
- Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari, Tanggal : Selasa, 25 Mei 2021
- Waktu : 14.06 s.d. 17.03 WIB
- Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPRRI Gedung Nusantara
I Lt, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Ketua Rapat : Aria Bima, Wakil Ketua Komisi VI DPRRI
- Acara : Pembahasan Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus
Pemalsuan Antigen dan Progres Pembuatan
Vaksin.
- Sekretaris Rapat : Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabag Sekretariat
Komisi VI DPRRI
- Hadir : A. Anggota DPRRI:
32 dari 54 orang Anggota dengan rincian:
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)
10 dari 12 orang Anggota
 1. Aria Bima
 2. Adisatrya Suryo Sulistio (matriks)
 3. Muhammad Prakosa
 4. Darmadi Duriant
 5. Rieke Diah Pitaloka
 6. ST. Ananta Wahana, S.H.
 7. I Nyoman Parta, S.H.
 8. Deddy Yevri Hanteru Sitorus, M.A.
 9. Dr. Evita Nursanty, M.Sc. (matriks)
 10. Sondang Tiar Debora Tampubolon

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)
7 dari 8 orang Anggota
 1. Gde Sumarjaya Linggih, S.E.,
M.A.P.
 2. Ir. H. Mohammad Idris Laena
 3. Drs. Mukhtarudin
 4. Lamhot Sinaga
 5. H. Singgih Januratmoko, S.K.H.,
M.M.
 6. Doni Akbar, S.E.
 7. Nusron Wahid

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA
(F-GERINDRA)
4 dari 7 orang Anggota
 1. Andre Rosiade
 2. Ir. H. La Tinro La Tunrung
 3. M. Husein Fadlulloh, B.Bus., M.M.,
M.B.A.
 4. Hendrik Lewerissa, S.H., L.L.M.

4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)
3 dari 5 orang Anggota
 1. Martin Manurung, S.E., M.A.
 2. Zuristyo Firmadata, S.E., M.M.
 3. Muhammad Rapsel Ali

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
(F-PKB)
3 dari 6 orang Anggota
 1. Ir. H. M. Nasim Khan
 2. Tommy Kurniawan
 3. Marwan Ja'far

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)
2 dari 5 orang Anggota
 1. DR. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si.
 2. Hj. Melani Leimena Suharli

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
(F-PKS)
1 dari 4 orang Anggota
 1. Hj. Nevi Zuarina

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
(F-PAN)
2 dari 5 orang Anggota

1. Abdul Hakim Bafagih
2. Daeng Muhammad, S.E., M.Si.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN (F-PPP)

-

B. UNDANGAN

1. DIRUT PT KIMIA FARMA
2. DIRUT PT BIO FARMA
3. DIRUT PT INDOFARMA

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/F-PDIP):

Dari Sekretariat menyampaikan di virtual ada di virtual ada 8 anggota kehadiran fisik yang tanda tangan 18 orang.

Sekarang kita bisa mulai Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPRRI dengan Direktur Utama PT Bio Farma, dengan Direktur Utama PT Kimia Farma, dan dengan Direktur Utama PT Indofarma, Masa Sidang ke-V Tahun Sidang 2020-2021, Selasa, 25 Mei 2021.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera buat kita semua,

Shalom,

Om Swastiastu,

Selamat datang Pak Demer,

Yang terhormat Pimpinan dan kawan-kawan Anggota Komisi VI yang hadir secara fisik maupun secara virtual, dan

Selamat datang kami ucapkan sekali lagi kepada Direktur Utama PT Bio Farma Bapak Honesti Basyir,

Selamat datang Direktur Utama PT Kimia Farma Pak Verdi Budidarmo, dan

Selamat datang Direktur Utama PT Indofarma Pak Arief Pramuhanto tentunya beserta seluruh jajarannya yang hadir pada siang hari ini.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat kepada kita, kita masih bisa rapat dalam keadaan sehat dan tak lupa *grengseng*-nya masih halalbihalal kami seluruh keluarga besar Komisi VI mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri *Minal Aidin Wal Faizin*, mohon maaf lahir dan batin.

Sehubungan dengan kondisi yang kita lihat terkait dengan penyebaran Covid yang masih berlangsung, rapat ini tetap kita adakan ya sesuai dengan peraturan rapat-rapat alat kelengkapan dewan dengan mitra kerja, dalam hal

ini adalah mitra kerja Kementerian BUMN tentunya bersama mitra-mitranya, BUMN-BUMN Farmasi dan rapat ini landasan hukumnya adalah berdasarkan Pasal 226 Ayat(3) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Yang intinya adalah rapat-rapat dapat dilakukan di luar gedung atas persetujuan Pimpinan DPR, maka pelaksanaan rapat-rapat dapat dilakukan secara tatap muka dan/atau secara virtual.

Kemudian, peliputan rapat dilakukan dengan *livestreaming* oleh TV Parlemen, media cetak, dan elektronik lainnya dapat mendapatkan sumber berita dari TV Parlemen sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dari pada sistem rapat-rapat kita yang sifatnya terbuka dan hanya tertutup apabila disepakati secara bersama-sama karena ada hal yang dianggap penting untuk kepentingan publik atau kepentingan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 249 Peraturan Nomor 1/2014 tentang Tata Tertib yang tentunya mengenai kehadiran daftar hadir dapat dilakukan dengan mencatatkan kehadirannya dengan sistem elektronik maupun secara fisik dan tentunya dua sistem kehadiran secara fisik ini dari jumlah apa yang dicatatkan sekretariat kepada kami pimpinan rapat sudah dinyatakan kuorum karena hadir 18 dan secara virtual 8 sekitar 27.

Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian,

Kami akan memulai rapat hari ini kita perhitungkan 2,5 jam hitung saja kita ini jam 15, 14.30 nanti saya buka dan kemudian maksimal kita akan selesai sekitar pukul berapa itu tadi 16.30, 2 jamnya 16.30 ya, pukul 16.00 lah 16.00, kita usahakan lebih cepat ya. Kemudian hal-hal yang terkait dengan rapat hari ini tidak bisa lepas dari rapat-rapat sebelumnya, apakah sekretariat bisa menampilkan keputusan kesimpulan rapat pada tanggal 29 Maret 2021 yang juga dihadiri oleh jajaran Direksi PT Bio Farma, Kimia Farma, dan Indofarma supaya ada satu kesinambungan rapat kita terkait dengan fungsi-fungsi Anggota DPR dalam hal ini adalah Pengawasan khususnya terkait dengan hal-hal yang menyangkut penanganan pandemi baik menyangkut virusnya, menyangkut penularannya dan dampak-dampaknya.

Yang pertama tentunya akan bacakan, kesimpulan yang pertama mohon ditampilkan. Yang kedua, kita tetap menginginkan bagaimana Komisi VI meminta pada mitra untuk berupaya dalam meningkatkan produksi vaksin dalam rangka pemenuhan kebutuhan-kebutuhan vaksin nasional sehingga proses vaksinasi dapat berjalan tepat waktu sesuai dengan target yang ditetapkan.

Waktu itu juga kita meminta kepada PT-PT BUMN Farmasi yang hadir dalam rapat itu untuk berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait tentunya juga lewat Kementerian BUMN melakukan proses distribusi vaksin yang secara efektif, tepat waktu, tepat sasaran terutama untuk masyarakat rentan menjadi prioritas penerima vaksin Covid-19, termasuk distribusi secara merata hingga ke daerah-daerah terluar, terpencil, dan terdepan di Indonesia.

Komisi VI juga di dalam rapat itu menyampaikan untuk memastikan penyimpanan, pengiriman vaksin dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam rangka mencegah kerusakan vaksin.

Komisi VI juga meminta ya bagaimana memastikan *supply* vaksin tidak terganggu yang waktu itu ada embargo vaksin yang terjadi di negara-negara penghasil vaksin yang saya melihat Menteri BUMN dan Menteri Luar Negeri telah mengadakan kunjungan-kunjungan strategis dengan negara-negara penghasil vaksin.

Di dalam rapat juga menyampaikan bagaimana rapat kerja dengan BUMN Farmasi menginginkan bagaimana pengadaan dan pendistribusian vaksin gotong-royong yang dicanangkan pemerintah pada tanggal (***rekaman tidak jelas***) PT Bio Farma berkontribusi secara aktif dalam proses pengadaan dan pendistribusian vaksin gotong royong yang dicanangkan oleh pemerintah. Kita lihat nanti kita ingin mendengarkan sejauh mana yang waktu itu pertimbangan vaksin gotong royong ada selain untuk mempercepat proses pengadaannya juga kita harapkan bisa membantu beban APBN dengan adanya vaksin yang gratis dari pemerintah walaupun vaksin gotong royong ini sampainya ke *user* juga tetap gratis oleh beberapa lembaga atau *company*.

Komisi VI di dalam rapat juga menegaskan pada tanggal 20 Januari 2021 waktu itu menyimpulkan keinginan supaya mempercepat penelitian dan proses vaksin merah putih sehingga dapat mendukung proses vaksinasi nasional ya sejauh mana ini juga proaktif dari pada BUMN Farmasi.

Dan juga dalam rapat itu menyimpulkan bagaimana BUMN-BUMN Farmasi ini berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi vaksin Covid-19 di masyarakat dalam rangka meningkatkan kepercayaan terkait dengan fungsi vaksin dalam kegiatan-kegiatan vaksin nasional untuk mempercepat proses persoalan pandemi ini minimal berkurang.

Komisi VI juga menginginkan bagaimana BUMN-BUMN Farmasi terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk menghasilkan berbagai hal yang menyangkut Covid-19 yang digunakan di Indonesia untuk memenuhi kriteria *safety*-nya, *quality*-nya, efikasinya, dan tentunya persoalan prioritas halal sudah terselesaikan.

Ini hal-hal yang rapat kemarin dan kita ingin mendapatkan sesuatu tentunya lebih pada progres *report* ya tentang hal-hal yang terkait dengan keputusan itu dan beberapa perkembangan yang mungkin membutuhkan keputusan-keputusan politik di Komisi VI ini terkait hal-hal apa saja yang bisa didorong untuk lebih mempercepat proses vaksinasi ini bisa terselenggara atau terlaksana dengan baik.

Demikian pengantar kami dan selanjutnya kami persilakan kepada kepada Direktur Utama PT Bio Farma untuk memberikan beberapa jawaban tertulis yang kami sampaikan dan mungkin jawaban tertulis itu juga di tidak di tidak tidak bisa dipisahkan dari kesimpulan rapat sebelumnya. Dan selanjutnya ke PT Kimia Farma dan PT Indofarma, waktu dan tempat kami persilakan.

DIRUT PT BIO FARMA:

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang,

Salam sejahtera bagi kita semua semoga sehat selalu,

Yang kami hormati Pimpinan Komisi VI DPRRI,

Yang kami hormati Bapak Ibu Anggota Komisi VI DPRRI baik yang hadir secara fisik maupun hadir secara *online* pada siang ini,

Bapak Pimpinan dan Anggota yang terhormat,

Izinkan kami akan mempresentasikan beberapa informasi terkait juga sebagai *follow up* dari rapat dengar pendapat kita bulan Maret yang lalu di undangan ada dua agenda yang akan kita berikan informasi lebih lanjut.

1. Tentang tindak lanjut dari kasus yang ada di antigen yang ada di Kualanamu Medan; dan
2. Tentang produksi dan distribusi vaksin Covid itu sendiri.

Khusus untuk yang tindak lanjut kasus Bandara Kualanamu nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Dirut Kimia Farma, mungkin sebagai *executive summary*-nya kami bisa sampaikan bahwa manajemen dalam ini pemegang saham mulai dari *holding* dan juga Kimia Farma sebagai grup yang langsung menangani Kimia Farma Diagnostika kita sedang mengambil tindakan-tindakan yang tegas dan juga dirasa perlu untuk memastikan bahwa kasus-kasus ini tidak akan terulang lagi ke masa depannya.

Next slide.

Jadi, sebagai *executive summary* kami sudah melakukan penggantian dari manajemen yang ada di Kimia Farma Diagnostika sendiri. Kemudian juga telah melakukan restrukturisasi organisasi untuk memperkuat sistem pengawasan dari operasional dari Kimia Farma Diagnostika sendiri, peningkatan kompetensi SDM, dan juga peningkatan dan penguatan sistem operasi SOP-nya karena memang kita sinyalir kemarin masih ada kasus yang di Kualanamu itu tidak disiplin dalam menjalankan SOP yang sebenarnya sudah ditetapkan dalam peraturan yang ada di oleh manajemen Kimia Farma Diagnostika.

Kemudian juga kita lakukan juga implementasi penguatan sistem layanan bersifat digital dan *cashless*, ini juga bagian dari cara kita untuk mengantisipasi tidak terjadinya lagi kasus yang sama ke depannya.

Kemudian, sinergi dengan *stakeholder*, peningkatan pengawasan mutu layanan kita dengan Kementerian Kesehatan, dengan Kementerian BUMN, dan juga dengan auditor pemerintah seperti dengan BPKP untuk memastikan bahwa ini juga bisa berjalan normal ke depannya.

Dan yang tidak kalah pentingnya audit Sistem Pengawasan Internal, jadi memang kita sudah memperkuat lagi sistem audit internal untuk memastikan bahwa semua SOP dan juga semua proses operasi yang ada dalam kasus tersebut ya bisa kita *manage* lebih baik ke depannya.

Dan terakhir kita akan menempatkan *Quality Assurance Officer* petugas pengawasan untuk memastikan semua SOP yang sudah ditetapkan perusahaan itu bisa berjalan dengan lancar. Untuk detailnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Dirut Kimia Farma.

Kami akan masuk ke agenda kedua tentang ketersediaan vaksin baik itu vaksin yang sifatnya program pemerintah maupun progres dari pelaksanaan vaksin gotong royong yang sudah dimulai *kick off*-nya oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 18 Mei yang lalu.

Next slide.

Jadi, seperti kita ketahui bersama untuk vaksin yang program pemerintah sampai saat ini kita sudah mulai dari bulan Desember, bulan Januari sampai sekarang kita sudah melakukan mendatangkan beberapa jenis vaksin dan juga ada berapa jenis vaksin lagi yang masih dalam *pipeline* untuk dilakukan *supply agreement*-nya dengan pengembang dan dengan Pemerintah Indonesia.

Untuk Sinovac sendiri ini seperti kita ketahui ini sudah kita datangkan dengan 2 bisnis model, yang pertama kita mendatangkan jenis vaksin jadi ini yang 3 juta dosis dan semua sudah diberikan kepada tenaga kesehatan di Republik Indonesia sebanyak 1,5 juta orang dan sekarang yang sedang kita lakukan yaitu kita mendatangkan bahan baku *Bulk* vaksin dari Sinovac sampai hari ini itu kita sudah mendatangkan sekitar lebih kurang 73,5 juta dosis bahan baku yang sudah kita produksi secara rutin di Bio Farma dan juga sudah kita distribusikan ke semua provinsi, kabupaten kotamadya untuk dilakukan program vaksinasinya.

Kemudian, juga ada jenis vaksin AstraZeneca, AstraZeneca ini ada dua jenis yang pertama adalah yang kita dapat donasi dari COVAX *facility* (GAVI) ini sifatnya gratis donasi dan sudah masuk ke Indonesia sebanyak 6,4 juta dosis dari komitmennya mungkin nanti lebih dari sekitar 11,7 juta dosis dan ini juga sudah kita mulai distribusikan dan berikan vaksinasinya kepada masyarakat.

Kemudian, juga ada jenis vaksin berikutnya yaitu AstraZeneca ini yang sifatnya B to B langsung *deal* antara Bio Farma dengan AstraZeneca global dan ini direncanakan akan mulai masuk ke Indonesia di minggu ke-2 atau minggu ke-3 Juni nanti, kita sudah berkontrak sebesar 50 juta dosis ini untuk program pemerintah juga yang gratis. Kemudian, juga ada lagi kontrak yang kami sudah lakukan dengan anak perusahaan kami yaitu Indofarma itu untuk jenis vaksin Novavax ini juga kita sudah ada *supply agreement* 50 juta dosis dan kemungkinan mungkin akan datang sekitar August atau September tahun ini.

Ini adalah jenis vaksin yang sudah kita lakukan *supply agreement*-nya masih ada di *pipeline* kita yaitu Pfizer ini juga masih kami harap mungkin sekitar bulan Juni-Juli ini akan selesai *deal supply agreement*-nya dengan pemerintah karena memang masih ada berapa klausal yang belum disepakati terutama masalah *indemnification* yang diminta oleh Pfizer kepada Pemerintah Indonesia dan perkembangan terakhir yang kami dapat info dari Kementerian Kesehatan ini adalah proses finalisasi yang diharapkan Juni atau Juli ini mungkin sudah selesai dan segera bisa didistribusikan, termasuk ke Indonesia dan distribusikan kepada masyarakat ini juga dalam bentuk vaksin program.

Nah, terkait masalah. *Next slide.*

Untuk ketersediaan vaksin Covid yang diproduksi oleh Bio Farma sendiri jadi bahan baku yang sudah kita terima tadi pagi juga ada kedatangan bahan baku 8 juta dosis sehingga angka 65,5 juta itu sudah bertambah menjadi 73,5 juta dosis. Total dari semua bahan baku yang sudah kita terima itu kita sudah melakukan produksi menjadi sekitar *update* terakhir tertulis masih 50 juta, tapi barusan kami cek ke produksi itu sudah berjumlah 51,3 juta dosis yang sudah siap vaksinnya. Kemudian dari sisi kapasitas produksi berdasarkan informasi kami sebelumnya ke Anggota Dewan yang terhormat, total kapasitas per tahun di Bio Farma itu adalah 250 juta dosis tapi dari beberapa proses SOP yang kami lakukan perbaikan untuk efisiensi sehingga dari kapasitas produksi itu bisa ditingkatkan menjadi 267,6 juta dosis per tahun. Kemudian, ini namanya vaksin Covid-19 Pak namanya Pak yang ya itu dari nomor EUA kita dapat dari Badan POM kita registrasikan atas nama vaksin Covid-19, ya ini yang produksi Bio Farma sendiri.

Next slide.

Nah, ini progres dari pelaksanaan vaksinasi itu sendiri, jadi kalau yang produksi Bio Farma total tadi yang kami sudah sampaikan 73,5 juta dosis ini angkanya belum kita *update* dengan data yang tadi pagi. Itu kita sudah produksi sebesar 51,35 juta dosis dan kita sudah mendapatkan rilis dari Badan POM 33 juta dosis, masih ada proses rilis 18,35 juta dosis dan total sudah kita distribusikan ke seluruh provinsi, kabupaten, kotamadya sebesar 32,3 juta dosis.

Kemudian, dari semua jenis vaksin yang sudah masuk di Indonesia, satu yang Sinovac ini yang vaksin jadi 3 juta, kemudian dari Bio Farma yang vaksin Covid-19 yang kita produksi 32,3 juta, dan AstraZeneca dari 6,4 juta yang masuk 4,5 juta sudah kita distribusikan sehingga total vaksin yang sudah masuk baik vaksin jadi maupun yang kita produksi sendiri itu sudah didistribusikan 39,8 juta dosis ke seluruh provinsi, kabupaten dan kotamadya.

Nah, dari semua yang sudah kita distribusikan itu sebesar hampir 25 juta dosis itu sudah diberikan kepada masyarakat, ada yang sudah mendapatkan vaksin pertama, ada juga yang sudah melakukan total penyelesaian vaksin kedua. Jadi, total yang sudah diberikan kepada masyarakat sebesar 25 juta dosis atau tepatnya 24,64 juta dosis.

Nah, terkait rencana produksi yang dilakukan di Bio Farma sendiri. *Next slide.* Dari semua vaksin yang masuk terutama ini yang khusus yang vaksin Covid yang diproduksi jadi kita sudah bikin *plan* ya bagaimana rencana produksi kita dan juga bagaimana rilis produksi seperti yang terlihat di gambar ini. Total yang akan kami *delivered* kepada pemerintah untuk vaksin Covid-19 itu sampai Oktober tahun ini sejumlah 125,5 juta dosis, di mana terdiri dari 3 juta dosis vaksin jadi dan 122,5 juta dosis yang akan kami produksi. Sampai bulan ini seperti yang kami sampaikan tadi 53 juta dosis kita sudah produksi dan 32,3 jutanya sudah kita melakukan distribusi.

Nah, mungkin sebagai tambahan informasi terkait *follow up* dari kesimpulan rapat dengar pendapat yang bulan Maret memang ada embargo yang dilakukan oleh berapa negara pengembangan vaksin produksi vaksin seperti Cina dan India, tapi untuk yang Cina *alhamdulillah* kita sudah mendapatkan pengiriman rutin lagi tadi pagi kita dapat 8 juta dosis, tanggal 31

Mei akhir bulan ini kita juga akan dapat tambahan sekitar 8 juta dosis lagi, jadi dah mulai normal lagi suplai bahan bakunya ke kita. Mungkin yang kita masih berusaha untuk melakukan komunikasi diplomasi dengan India karena memang kita tahu sendiri kasus India memang sangat luar biasa sehingga yang vaksin yang diproduksi di India Novavax kemungkinan juga akan datangnya agak mundur 1 bulan dari rencananya Juli kemungkinan mungkin akan datang sekitar Agustus-September, tapi kita dengan adanya produksi sendiri yang vaksin Covid-19 Insya Allah sampai Agustus-September itu *supply* vaksin kita untuk melakukan program pemerintah itu masih bisa kita garansi pada tingkat yang bisa dilakukan dan bisa kita percepat.

Kemudian selanjutnya, *next slide*.

Terkait vaksin gotong royong. Seperti kami sampaikan di awal memang vaksin gotong royong ini sudah dimulai tanggal 18 Mei kemarin, dari Keputusan Menteri Kesehatan yang kita terima sampai saat ini ada dua jenis vaksin yang sudah disetujui untuk menjadi bagian dari vaksin gotong royong yaitu Sinopharm dari Cina dan juga Cansino dan Cina. Ada satu lagi yang masih proses Sputnik itu masih berproses dengan kementerian dengan Badan POM dan tentunya kita menunggu progres lebih lanjut nanti untuk rencana *supply agreement*-nya.

Pelaksanaan yang 18 Mei kemarin *kick off* itu baru menggunakan satu jenis vaksin yaitu Sinopharm, kita sudah kedatangan 500.000 dosis vaksin dan ini sudah dialokasikan ke beberapa perusahaan-perusahaan swasta dan juga BUMN, proporsinya dari 500.000 yang pertama ini 75% kita berikan alokasinya untuk swasta dan 25% kita berikan untuk BUMN dan kita sudah lakukan proses vaksinasinya.

Sampai hari ini kita sudah melakukan vaksinasi dari vaksin gotong royong itu sebesar 77.000 ya 77.000 sudah kita distribusikan pelaksanaan penyuntikannya sudah dilakukan 22.000 jadi kita masih punya 400-an ribu lagi yang segera akan kita lakukan secara *schedule*, target kita untuk 500.000 pertama ini akan selesai paling telat bulan Juni ini. Kemudian akan ada lagi *supply* berikutnya dari Sinopharm juga paling telat juga akan datang sekitar minggu kedua bulan Juni tahun ini dan jumlahnya seperti yang disampaikan dari Sinopharm itu akan diberikan minimal 1 juta dan kita juga tadi dengan KADIN kita sudah melakukan diskusi untuk memberikan alokasi berikutnya kepada perusahaan swasta dan juga BUMN dan juga faskes-faskes yang akan terlibat nanti dalam proses vaksinasinya.

Tarif juga sudah ditetapkan oleh Menkes yaitu untuk untuk jenis untuk vaksin sendiri itu sekitar Rp321.660,- dan untuk layanan vaksinasinya sebesar Rp117.910,-, artinya total untuk satu kali penyuntikan vaksin gotong royong itu sebesar Rp439.570,- ini sudah berjalan sampai hari ini.

Kemudian ada 1 jenis vaksin lagi yang sudah ditetapkan juga yaitu Cansino Cina, ini memang sedikit berbeda dengan Sinopharm dia hanya menggunakan satu dosis atau satu kali penyuntikan, ini nanti rencananya kita akan *supply agreement* dengan mereka sejumlah 5 juta dosis di mana vaksin pertama 3 juta dosis itu akan datang sekitar Juli sampai September dan sisanya 2 juta dosis akan datang di Q4 2021. EUA-nya masih kita lakukan proses dengan Badan POM kita berharap mungkin bulan Juni ini sudah bisa

keluar EUA-nya dan bisa dapat dilaksanakan vaksinasi setelah vaksinnya datang ke Indonesia.

Nah, bagaimana dengan alur pelaksanaan vaksinasi gotong royong? Jadi, dalam ini ada ada 4 *stakeholder* yang terlibat. Satu, memang korporasi sendiri yang terlibat dalam vaksin gotong royong ini di mana mereka akan membiayai karyawannya sehingga *memang narasi* pemerintah masyarakat tetap gratis itu masih *inline*, korporasi inilah nanti yang akan melakukan order pembelian vaksin itu sendiri kepada Bio Farma melalui proses registrasi ke Kadin sebagai *gateway* mereka untuk mendapatkan alokasi. Kemudian Bio Farma sendiri akan dan grup yaitu Kimia Farma dan Indofarma kami akan bertanggung jawab untuk distribusi yang mulai dari *supply agreement*-nya, importasinya, distribusi ke korporasi dan juga faskes dan juga nanti pelaporannya kepada Kementerian Kesehatan.

Faskes ini akan melibatkan faskes swasta dan juga faskes BUMN dalam pelaksanaan proses vaksinasinya. Dan Kementerian Kesehatan dalam hal ini di *support* oleh dinas kesehatan provinsi kabupaten kotamadya untuk mengawasi pelaksanaan dari semua faskes-faskes yang terlibat dalam vaksin gotong royong ini.

Nah, alurnya sendiri jadi dalam hal ini badan hukum dan badan usaha mereka akan mengirimkan surat registrasi kepada KADIN ya kemudian KADIN akan menyerahkan datanya kepada Bio Farma. Bio Farma nanti yang akan melakukan proses berikutnya ke Kemenkes untuk menentukan alokasi dan juga faskes yang layak untuk melakukan program vaksinasi gotong royong ini. Terakhir kemudian dari semua proses ini semua data-data masyarakat ataupun karyawan yang sudah melakukan vaksinasi akan terintegrasi dengan program 1 data yang sudah dikembangkan oleh pemerintah.

Dari sisi kesiapan fasyankes, jadi sudah ada sekitar 369 fasyankes baik swasta maupun BUMN yang terlibat dan sudah layak ini juga kita mendapatkan kriteria layaknya dari dinas kesehatan setempat yaitu 352 klinik dan 17 rumah sakit dan kita masih bekerja sama untuk memverifikasi sekitar 542 fasyankes yang akan terlibat di program vaksinasi gotong royong berikutnya di mana semuanya itu adalah terlibat 244 klinik yang kita lagi evaluasi dan ada 298 Rumah Sakit yang juga lagi kita lakukan proses verifikasi.

Nah, semua dari vaksin-vaksin ini kita akan memastikan bahwa semuanya akan didistribusikan sesuai dengan standar-standar yang berlaku dan sudah ditetapkan oleh Badan POM. Dalam hal ini semua distributor yang terlibat dipastikan bahwa mereka sudah memenuhi kriteria dan mereka sudah mendapatkan Sertifikasi CDOB dari Badan POM dan juga kita pastikan bahwa *Cold Chain* sistemnya juga sudah *eligible* ataupun memenuhi persyaratan untuk bisa menjadi bagian dari distribusi vaksin ini.

Tetap dalam hal ini untuk *supply*-nya kami Bio Farma dan anak perusahaan Kimia Farma dan Indofarma bekerja sama distribusinya dan kami juga melakukan proses *monitoring* secara IT atau digitalisasi sistem distribusi di mana setiap vaksin di *file*-nya itu maupun di *secondary* dari ataupun seri *packaging*-nya itu ada *barcode* untuk memastikan bahwa vaksin-vaksin itu

memang vaksin yang sudah legal mendapatkan izin dari Badan POM dan kita akan monitor nanti mereka juga bisa distribusikan dengan standar-standar ataupun kaidah yang berlaku dan sampai juga kepada masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan untuk itu. Jadi, mulai dari produksi ya Bio Farma ataupun dari gudang kita *warehouse* kita *Cold Chain* sistem kita itu kita kirim ya mulai dari mulai provinsi, kabupaten kotamadya dan juga sampai ke fasyankes kita bisa memastikan bahwa memang semua vaksin itu memenuhi kriteria terutama satu dari sisi temperatur itu tidak boleh melebihi dari *minus* 2 sampai 8 derajat Celcius dan juga kondisi penyimpanan yang ada di daerah juga kita pastikan mereka memiliki *Cold Chain* sistem yang sudah terstandardisasi.

Untuk khusus untuk fasilitas program vaksin pemerintah, sudah ada perubahan kerja sama yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Kalau selama ini kami hanya mendistribusikan sampai ke provinsi, selanjutnya dari provinsi ke kabupaten kotamadya dan fasyankes itu dilakukan oleh dinkes setempat. Tapi sejak Mei ini kami sudah diberi tambahan oleh pemerintah dalam hal ini Kemenkes untuk mendistribusikannya sampai ke kabupaten kotamadya dan juga sampai ke fasyankes yang ada di wilayah kabupaten kotamadya tersebut dan kita bekerja sama dengan lebih kurang ada 7 atau 8 distributor swasta yang siap sama-sama kita untuk mendistribusikan sampai ke pelosok seluruh Indonesia.

Nah, sistem-sistem itu seperti kita sampaikan tadi di awal memang kita sudah melakukan proses digitalisasi sehingga kita bisa memastikan bahwa vaksin itu adalah vaksin yang berkualitas, vaksin itu adalah vaksin yang asli dan juga masyarakat yang menerima vaksin itu terdata nanti dengan aplikasi-aplikasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan kita juga memiliki *dashboard control* untuk memastikan bahwa vaksin itu *ter-deliver* sesuai dengan permintaan dari pemerintah ke mana saja akan dikirimkan.

Mungkin itu yang bisa sampai sampaikan Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi VI, nanti kami juga akan siap untuk melakukan tanya jawab untuk menjelaskan lebih lanjut dari *summary* yang kami sampaikan tadi. Demikian terima kasih siap.

KETUA RAPAT:

Pak Dirut *slide* terakhir, *slide* terakhir, *slide* terakhir mohon diulang. Yang ditampilkan yang bawah *slide* terakhir. Ini apa Pak?

DIRUT PT BIO FARMA:

Oh ini sebaran mitra distributor kita Pak Bapak Pimpinan. Jadi kita.

KETUA RAPAT:

PBF.

DIRUT PT BIO FARMA:

Itu PBF-nya Pedagang Besar Farmasi, jadi distributor Pak. Istilahnya kalau di..

KETUA RAPAT:

Anak perusahaan BUMN?

DIRUT PT BIO FARMA:

Tidak hanya anak perusahaan tapi juga ada swasta yang terlibat untuk membantu kita. Jadi ada 7 PBF swasta yang terlibat di samping juga anak perusahaan kami Kimia Farma dari Indofarma. Tugas mereka itu memastikan pendistribusian vaksin sampai ke layanan terujung.

KETUA RAPAT:

Jadi ini gabungan antara *private* sama anak perusahaan?

DIRUT PT BIO FARMA:

Iya, gabungan semuanya. Jadi ada yang sifatnya nasional, ada yang sifatnya daerah karena untuk daerah timur seperti Papua kita bekerja sama dengan mitra lokal karena memang daerahnya memang agak agak agak susah kalau di ini kan jadi butuh butuh penanganan khusus terutama dari sisi transportasinya.

KETUA RAPAT:

Oke.

DIRUT PT BIO FARMA:

Demikian Bapak Pimpinan bisa kami sampaikan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Dari Pak Dirut PT Bio Farma. Selanjutnya kami persilakan dari Kimia Farma.

DIRUT PT KIMIA FARMA:

Baik, terima kasih.

Pak Pimpinan Komisi VI dan Bapak Ibu Komisi VI yang kami hormati,

Melanjutkan dari Dirut PT Bio Farma terhadap tindak lanjut Kualanamu, mungkin *slide* bisa ditampilkan, *next, next*.

Seperti yang disampaikan oleh Pak Dirut dari PT Bio Farma tadi ada lima langkah dari pembenahan dari Kimia Farma Diagnostika terhadap kasus tindak lanjut dari Kualanamu. Yang pertama adalah sedikit saya ulang restrukturisasi organisasi. Terus yang kedua adalah penguatan sistem layanan digital. Yang ketiga adalah sinergi dengan *stakeholder*. Yang keempat adalah audit sistem pengawasan internal. Yang kelima adalah *quality assurance* terhadap *officer*.

Untuk restrukturisasi organisasi, *next*.

Yang pertama adalah bertujuan penguatan sistem pengawasan mutu. Yang kedua adalah fokus pada peningkatan pengawasan kegiatan operasional. Yang ketiga adalah melakukan penambahan struktur organisasi dalam pengawasan mutu. Yang keempat adalah menjamin bahwa seluruh proses sesuai dengan SOP dan regulasi. Yang kelima adalah melakukan *assesment* secara berkala dengan lembaga sertifikasi terkait dengan Sistem Jaminan Mutu.

Next.

Dan kami juga melakukan terhadap *Reinforcement* AKHLAK yaitu dengan dilakukannya sosialisasi dan aktivasi *core values* AKHLAK ke seluruh karyawan dan tenaga *outsourcing*. Terus yang kedua dengan penandatanganan komitmen AKHLAK untuk seluruh karyawan. Yang ketiga adalah melakukan webinar AKHLAK oleh ACT dalam hal ini Bapak Ary Ginanjar. Yang keempat adalah penguatan AKHLAK dalam proses rekrutmen dan *on boarding* pegawai baru.

Selain itu juga kita melakukan penguatan *leadership* di titik layanan melalui program *Management Trainee* di mana rekrutasi dari 31 orang *Management Trainee* untuk pemenuhan kebutuhan organisasi yang akan mendapat proses *on boarding* dengan penguatan materi Wawasan Kebangsaan dan Bina Mental. Selain itu, kita juga melakukan penguatan Kompetensi Teknis baik itu dari sisi *Quality Management*, Penerapan *Standard Operation Procedure*, serta Manajemen Risiko.

Next.

Program kedua adalah Penguatan Sistem Layanan Digital di mana, yang pertama adalah dilakukan sistem registrasi ID pelanggan secara digital yaitu posisi cetak dari hasil tes akan diberikan dalam bentuk *QR Code*. Yang kedua adalah meningkatkan transaksi digital yaitu bekerja sama dengan pihak perbankan dengan membayar dengan melakukan proses pembayaran dengan *cashless* baik itu mesin EDC ataupun QRIS. Yang ke-3 adalah pemasangan *barcode* untuk produk Kimia Farma.

Next.

Dan kita juga melakukan kegiatan sinergi dengan *stakeholder* di mana sinergi yang bertujuan untuk peningkatan pengawasan mutu layanan ini ditujukan kepada pelanggan melalui kerja sama dengan *stakeholder* antara lain *holding* BUMN farmasi, regulator dalam hal ini dinas kesehatan yang ada di masing-masing daerah tempat laboratorium klinik dan lembaga sertifikasi baik itu sinergi dengan dinas kesehatan, dan kerja sama dengan Imunicare Bio Farma, serta dilakukan *assessment* berkala dengan lembaga sertifikasi.

Next.

Audit Sistem Pengawasan Internal dilakukan meliputi dari target seluruh outlet Kkinik dan laboratorium klinik ada 73 laboratorium klinik dimana 4 flagship dan 69 hub dan 422 klinik yang terdiri ada di layar sehingga totalnya ada 495 Outlet. Sedangkan program yang kelima adalah *Quality Assurance Officer* penempatan petugas khusus di setiap *Business Manager* sebagai *Quality Assurance Officer* yang bertugas untuk melakukan evaluasi secara berkala dan melakukan *update* SOP sesuai dengan regulasi dan ISO.

Next.

Perbaikan fundamental PT Kimia Farma Diagnostika dilakukan dengan beberapa tadi beberapa sudah kami jelaskan secara garis besarnya yaitu Peningkatan Sistem Manajemen Mutu, secara detail ada di layar. Terus Peningkatan Kompetensi SDM. Yang ketiga adalah *Review* Struktur Organisasi. Yang keempat adalah pelibatan pihak regulator dan *stakeholder* kesehatan dengan strategi peningkatan layanan melalui peningkatan baik itu proses, *physical evidence* dan people.

Next.

Adapun analisa dan mitigasi risiko terkait dengan risiko operasional, risiko hukum, risiko citra perusahaan, dan risiko finansial seperti yang terpampang di layar.

Next.

Dan kami juga melakukan edukasi kepada seluruh pelanggan dan *stakeholder* sebagai komitmen dari PT Kimia Farma Diagnostika dalam melaksanakan kegiatan operasional khususnya pemeriksaan rapid test antigen di seluruh layanan klinik Kimia Farma.

Demikian untuk melengkapi hal-hal atau tindak lanjut yang sudah disampaikan oleh Bapak Dirut PT Bio Farma terkait dengan tindak lanjut dari kasus Bandara Kualanamu. Kami kembalikan ke Bapak Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya kami persilakan kepada Direktur PT Indofarma.

DIRUT PT INDOFARMA:

Baik, terima kasih Bapak Pimpinan dan Bapak Anggota Komisi VI.

Kami hanya melengkapi saja apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dirut Bio Farma. Yang pertama adalah mengenai Novavax Pak, tadi sudah disampaikan bahwa komitmennya adalah 50 juta dosis dan itu akan di-*deliver* di tahun 2021 ini Pak.

Memang ada keterlambatan karena memang bahan bakunya dari Amerika agak sedikit terlambat Pak sampai di India sehingga baru mulai produksi di bulan-bulan akhir April atau awal Mei kemarin dan itu barang itu vaksin itu baru akan jadi *batch* pertama itu di bulan Juli sehingga nanti

diharapkan bisa kita *deliver* di *first batch*-nya itu di bulan Agustus atau paling telat di bulan September Pak.

Schedule-nya kurang lebih saya bisa sampaikan adalah di bulan September kurang lebih ada 4 juta dosis, kemudian di Oktober ada 10 juta dosis, kemudian di November dan Desember masing-masing 18 juta dosis Pak. Jadi, ini total 50 juta dosis dan itu memang sudah komitmen dari pihak SII-nya atuh bisa men-*deliver* di tahun 21 Pak.

Itu kira-kira Pak tambahan dari kami untuk melengkapi saja dari yang sudah sampaikan oleh Pak Dirut Bio Farma Pak. Kami kembalikan kepada Pimpinan Pak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih paparan atau jawaban dari pertanyaan tertulis yang kita kirimkan kepada mitra kerja dan selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada kawan-kawan Komisi VI untuk melakukan pendalaman. Saya mau menanyakan kepada kawan-kawan ada permintaan dari salah satu Pimpinan untuk didahulukan, Pak Martin yang saat ini di Moskow lewat *live streaming* ada pertanyaan yang terkait dengan rapat kerja kita ini, apakah bisa diberi kesempatan lebih dulu? Setuju ya?

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Kalau *nggak* sendiri belakangan aja Tin.

F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.):

Sebentar karena ini lagi di sela-sela.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Martin.

F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.):

Terima kasih, terima kasih Mas Bimo.

Yang saya hormati rekan-rekan semua Pimpinan, dan Anggota Komisi VI yang terhormat.

Saya terima kasih karena mendapat kesempatan ini saya tidak panjang tapi saya rasa ini penting. Pertama adalah juga kepada mitra kerja yang saya hormati.

Pertama kasus Kualanamu ini saya pikir adalah ya saya tidak ingin menyalahkan siapapun juga tapi ini adalah wajah kita semua Pak Dirut, wajah kita semua. Jadi, kita merencanakan membuat perencanaan itu baik dan saya ingat ya dalam berkali-kali presentasi kita dalam RDP di Komisi VI ini saya masih ingat gitu bagaimana mekanisme dan sistem yang akan diterapkan.

Akan tetapi, kemudian apa yang tidak apa yang direncanakan itu tidak disertai *controlling* dan juga *monitoring* yang yang ketat dan baik gitu sehingga kemudian terjadilah seperti apa yang kita sudah lihat di Kualanamu dan saya pikir ada beberapa tempat lain saya tidak ingin menyebutkan dalam rapat ini karena saya tidak sedang mencari sensasi tapi saya ingin menekankan kepada kita semua bahwa *controlling* dan *monitoring* itu sangat penting. Jadi, ini jangan sampai terulang lagi karena ini akan meruntuhkan seluruh sistem kepercayaan kita kepada BUMN yang saat ini sedang kita bangun bersama. Jadi, bagaimana BUMN ini menjadi dipercaya oleh masyarakat kita apalagi dalam masa pandemi.

Nah, kedua terkait dengan kondisi pandemi kita saat ini Pak Honesti dan kawan-kawan, kita ini sudah menghadapi kondisi di mana ya tahap *testing* dan *tracing* kita tidak berjalan maksimal itu kita harus akui ya. Di Moskow ini misalnya *testing* ya PCR Test itu sudah 135 juta ya jadi sehingga mereka juga merasa PD gitu untuk bisa *manage* ini pandemik, pembatasan tidak lagi terlalu banyak, tetapi manajemen pandemi ini yang kemudian dilakukan dengan baik sehingga tidak perlu banyak pembatasan-pembatasan.

Nah, kita menghadapi kita harus akui secara jujur Pak saya ini pendukung pemerintah Pak ya partai saya juga pendukung pemerintah, saya ya Mas Bimo tahu saya juga tim kampanye nasional Pak Jokowi untuk dua kali pilpres, jadi masukan saya ini untuk kebaikan kita semua bukan karena kritik atau yang lain-lain. Tapi, kita harus akui bahwa kita belum maksimal menjalankan *testing* dan *tracing* sehingga kita harus melakukan pembatasan-pembatasan yang sangat ketat dan kita alami pada saat kemarin mudik lebaran ya itu luar biasa saya lihat kekacauan dalam arti bagaimana kita bisa membuat orang jutaan manusia ini tidak bergerak dan itu tidak gampang. Nah, kenapa kita membatasi sedemikian ketat karena *testing* dan *tracing* kita yang memang belum maksimal atau terbatas.

Nah, saya mau ingatkan sekarang kepada kita semua ya khususnya kepada Direksi BUMN kita Pak, jangan terulang cerita yang sama soal vaksinasi. Vaksinasi kita juga saya lihat *test*-nya masih belum maksimal belum belum cepat dan juga stok yang tersedia juga ya *sorry to say* kita masih belum bisa melihat bahwa stok yang tersedia itu membuat kita tenang gitu bahwa semua orang akan bisa mendapatkan vaksinasi.

Nah, karena itu tolong kita ini kita harus bahu-membahu ya, jadi BUMN memegang peranan penting saya setuju sangat amat setuju, tapi BUMN memegang peranan hanya BUMN saya rasa *nggak* akan sanggup Pak. Bio Farma dan kawan-kawan ini juga meng-*administer* seluruhnya. Jadi, buka kesempatan kalau perlu kumpulkan semua *stakeholder* yang ada di masyarakat kita juga dunia usaha bagaimana kita mencapai 180 juta 181 juta *herd immunity* itu untuk bisa tercapai, buka kesempatan yang penting adalah pencatatan yang dilakukan dengan baik oleh baik untuk Kementerian Kesehatan atau pihak-pihak *stakeholder* terkait di situ.

Jadi, jangan sampai ini terulang persoalan vaksinasi kita tidak maksimal sehingga pandemi ini kemudian tidak selesai-selesai di kita dan lambat sekali progresnya dan itu bisa membahayakan juga penduduk kita dan perekonomian kita juga. Jadi, Mas Bimo saya tidak panjang-panjang saya

ingin menekankan itu karena setelah ini kami juga akan bertemu ada pertemuan lagi terkait juga dengan manajemen pandemi ini di Moskow semoga ini juga nanti bisa kemudian jadi masukan untuk kita semua agar kita bisa meng-*administer* ini me-*manage* pandemi ini dengan baik.

Terima kasih sekali lagi Mas Bimo dan kawan-kawan sudah memberikan kesempatan pada saya. Sekali lagi terima kasih, selamat pagi, selamat siang untuk kita semua.

F-P.GOLKAR (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P.):

Jangan jangan lupa beli vaksin gregus.

KETUA RAPAT:

Teman-teman kemungkinan sebagian besar akan mendalami atau pertanyaan pendalaman yang terkait dengan penemuan daur ulang alat kesehatan *rapid test antigen* yang terjadi di Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang. Dan supaya supaya kita akan membahas hal yang lain-lainnya saya prioritaskan dulu untuk yang masih mau menanyakan persoalan yang terkait dengan kasus antigen daur ulang *rapid test*. Cukup? Silakan dulu.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Iya cuma mau begini aja.

Pertama kita harus meyakini bahwa yang terjadi di Kualanamu hanya di Kualanamu, itu perlu dievaluasi saya kira apakah tidak terdeteksi berarti memang tidak ada ini kita lebih yakinkan dulu Pak ya.

Yang kedua saya melihat kejadian yang vaksin sama ini di Sumatera Utara juga kejadiannya. Nah, saya takutnya nanti ada vaksin isinya air mineral Pak, bukan *nggak* mungkin terjadi, bukan tidak mungkin kan? Nah, ini juga yang saya pertanyakan, katanya dulu vaksin itu kan pakai *barcode* sehingga tahu ke mana aja barang itu dari tempat dia ditaruh dikirim ke mana ada *barcode* teknologinya begini saya kira uangnya juga besar teman-teman desain programnya, kenapa bisa kejadian seperti yang di Medan? Harusnya buat LP larinya entah ke mana. Apakah tidak dimonitor pergerakan? Lalu buat apa dia dikasih apa namanya *barcode-barcode* itu? Kan ini yang kita ingin Pak kepastiannya ini gimana ini menghadapi masalah ini. Ini sekalian aja saya bertanya ya, nggak ngulang ya.

KETUA RAPAT:

Ya, boleh.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Nah, terus ini Pak, sekarang nih banyak kekacauan di masyarakat karena.

KETUA RAPAT:

Khusus vaksin ya, jangan ke mana-mana dulu.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Tadi kan udah.

KETUA RAPAT:

Nggak, ada yang lain cukup? Cukup ya. Intinya bahwa nanti saya persilakan nanti kita akan minta Pak Direktur Utama Kimia Farma, juga ke Bio Farma dan juga ke Indofarma ini merupakan suatu hal yang memalukan kita semua, termasuk kita yang di sini, termasuk kita yang ikut mengawasi.

Tadi disepakati oleh Pak Dirut Kimia Farma ada perbaikan manajemen ya tadi dan harus dipahami oleh seluruh SDM terutama sekali untuk yang menyangkut vaksin untuk pandemi Covid-19 ini terutama sekali ya kan ini yang penting terkait dengan perbaikan manajemen ya untuk SDM agar kejadian itu ya bisa atau dijadikan sebagai satu perbaikan pelayanan ke seluruh provinsi di Indonesia untuk semua *stakeholder* termasuk tadi yang saya katakan itu apa Pak jaringannya tadi ada *private*, ada BUMN ya walaupun itu hanya terkait masalah *delivery*-nya ya tapi kalau sampai keliru vaksinnya bisa berubah. Ini yang saya maksudkan perbaikan SDM ini SOP-nya jelas ya, jadi kalau melanggar itu juga jelas kemudian sanksinya akan mengikuti. Ini penting ya akan kita jadikan sebagai salah satu kesimpulan.

Selanjutnya kawan-kawan karena saya harus mengatur jam 6 itu harus ada rapat lagi, saya akan edarkan terutama konsentrasi terkait dengan distribusi vaksin yang harus diperhatikan betul agar vaksin tidak rusak terutama ke daerah terpencil kalau masih ada teman-teman. Pak Deddy silakan dulu satu pertanyaan lagi.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Ini perlu mungkin walaupun mungkin bukan hanya tugasnya *holding* Farmasi ya tapi menyangkut masing-masing vaksin ini saya kira perlu ada sosialisasi dan edukasi Pak karena kan yang kita tahu misalnya berbagai informasi yang beredar nih kan ada beberapa jenis vaksin yang masuk di kita, ini kelebihan kelemahan masing-masing vaksin itu apa sih ya? Misalnya kita tahu kita banyak pakai Sinovac, orang banyak bilang Sinovac itu tidak efektif, Sinovac belum dapat WHO, di sisi lain orang dengar katanya pakai Pfizer atau Moderna ya yang ditunda ya? yang kita dengar nih 3 vaksin itu Pfizer, AstraZeneca, Moderna itu sudah ada korban jiwanya di negara lain mungkin di kita juga sudah.

Nah, ini saya kira perlu Pak edukasi yang yang jelas di masyarakat supaya tahu kalau apa namanya kondisi tertentu karena ini *nggak* disiplin juga di bawah. Ada kejadian ini yang saya tahu orang darah tinggi maksa minta disuntik setelah disuntik lumpuh Pak karena tekanan darahnya waktu itu 180 kalau saya *nggak* salah, nah yang kayak gini kan berarti kan nakesmya *nggak* *nggak* *nggak* apa namanya tidak tidak konsisten gitu loh, itu yang pertama.

Nah, yang kedua soal vaksin, vaksin Mandiri ini, vaksin Mandiri ini totalnya berapa sih sebenarnya yang *registered* ada angka 30, ada angka 80 juta saya *nggak* tahu mana yang benar dan harga yang benarnya berapa? Ini saya kira biar jangan apa namanya membingungkan masyarakat juga gitu. Jadi, kalau memang di dalam kesanggupan orang mungkin kalau males nunggu dapat vaksin pemerintah dia bisa beli misalnya gitu atau dia bisa mengajukan diri untuk vaksin-vaksin Mandiri, jadi supaya ada kejelasan Pak.

Yang terakhir ini saya titip Pak dapil saya di Kalimantan Utara penduduknya cuma *tujuh ratu ribuan* Pak itu daerah perlintasan berbatas dengan 3 negara ya Malaysia, lalu Brunei, Filipina ya bahkan Taiwan langsung, jadi mobilitas orang pulang pergi itu sangat tinggi Pak dan saya dengar di sana sudah ada apa namanya yang virus yang India sudah sudah di sana gitu. Kalau bisa Pak ini masyarakat transit seperti ini daerah transit seperti ini tolong diperhatikan Pak, mungkin bukan di *Holding Farmasi* tapi di Kementerian Kesehatan, tapi mungkin saya kira perlu bisa di saya titip ke BUMN Farmasi untuk memperjuangkan supaya Kalimantan Utara bisa segera divaksin karena mengingat situasi geografisnya dan penduduknya yang tidak terlalu banyak.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Saya menambahkan dari pertanyaan Pak Deddy untuk bisa dijawab, ada *nggak* terkait dengan asuransi yang mengalami efek samping akibat vaksin nanti ditambahkan. Selanjutnya, kami persilakan ke sebelah kanan Pak Nusron Wahid, kalau belum Pak Lamhot.

Silakan Pak Nusron.

F-PG (NUSRON WAHID):

Baik Pak, Terima kasih Pak.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Sebetulnya substansi pertanyaan saya itu hampir sama dengan yang disampaikan oleh Pak Deddy Sitorus berkaitan dengan vaksin jamaah haji. Sebagaimana kita ketahui per hari ini Pemerintah Arab Saudi itu sudah mengumumkan kuota haji buat negara-negara lain di luar Indonesia, jadi dipastikan jamaah haji tahun ini dibuka dengan kuota 40% dari semula. Jadi, kalau semua itu ada 2 juta manusia kumpul diperkirakan waktu nanti wukuf, tahun ini itu hanya sekitar 40% berarti sekitar 800.000 orang pas wukuf itu dan sudah dibagi kuotanya masing-masing.

Kalau asumsi sekitar 40% oh mohon maaf salah 20% maaf saya salah karena Indonesia itu hanya dapat kuota sekitar 40.000, tapi belum diumumkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Kenapa belum diumumkan? Karena ketidakpercayaan masyarakat internasional terhadap proses vaksinasi di Indonesia karena Sinopharm Sinovac-nya itu yang Bapak beli Pak Honest beli ini telah mendapatkan sertifikasi dari WHO. Sehingga kemarin kebetulan pada bulan puasa kemarin saya juga kebetulan secara pribadi berhasil mendapatkan visa umroh, rencana bersama rombongan dengan Pimpinan DPR tapi karena ada sesuatu hal maka batal tapi saya mau berangkat sendiri ternyata juga *nggak* bisa berangkat karena saya tidak mempunyai sertifikat vaksin yang sudah disetujui WHO yaitu AstraZeneca maupun Pfizer yang lebih (***rekaman tidak jelas***) karena Sinovac ternyata tidak bisa dipakai dan diakui di sana.

Sebentar lagi pada bulan depan 40.000 orang ini terancam untuk dia bisa berangkat ke naik haji pasti akan menjadi isu politik yang luar biasa. Kalau sampai jamaah haji di luar Indonesia itu bisa berangkat karena telah divaksin oleh negaranya ya kan dan mendapatkan sertifikasi dari WHO sementara di Indonesia vaksin yang dipakai yang ditentukan ini ternyata tidak diakui oleh masyarakat internasional termasuk tidak diakui untuk kepentingan jamaah haji.

Nanti, isunya akan bergeser jangan-jangan vaksin Sinovac ditolak Tuhan di sana karena menghadap Tuhan *nggak* bisa mau naik haji, ini bakal ramai. Nah, karena itu mumpung ini masih ada waktu saran dan pendapat saya kepada Pak Honest menurut saya sudah baik dalam memimpin menjadi komandan lapangan dalam vaksinasi nasional ini sudah baik, sudah wasis kalau orang Jawa bilang itu baik penampilan di *public*, implementasi di lapangan, meng-*create* dan berhubungan dengan *stakeholder* itu saya nilai sudah baik.

Cuma kalau perkara ini tidak segera diselesaikan dengan baik ini akan menjadi tsunami Pak dan prestasi Bapak selama ini yang menangani vaksin selama pandemi ini hilang karena menyangkut, kecuali kalau dunia memutuskan menyangkut masa depan hak orang yang mau berangkat batal karena vaksinnya *nggak* diakui. Terus untuk apa negara itu *spend* uang segini banyak toh ujung-ujungnya tidak diakui di dalam dunia internasional? Menyelamatkan 100% juga tidak, diakui juga tidak, sementara uangnya pasti keluar banyak.

Saya tidak mau mengatakan bahwa vaksin ini *nggak* ada manfaatnya, banyak manfaatnya meskipun tidak 100% ini apa namanya mampu menjamin keselamatan orang dalam arti kebal terhadap virus ini *nggak* mungkin, tapi setidaknya ini membantu. Sekali lagi tapi ini akan menjadi isu yang krusial kalau sampai nanti negara-negara lain di luar Indonesia bisa berangkat naik haji karena kebetulan negara lain itu menggunakan vaksin di luar Sinovac yang kebetulan sudah mendapatkan *license* dari WHO. Sementara di Indonesia itu nanti *nggak* jadi berangkat haji karena menggunakan Sinovac yang belum mendapatkan *license* dari WHO, itu saja konsen saya Pak.

Terima kasih Pak.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ibu Nevi, mohon dipersingkat waktu.

F-PKS (Hj. NEVI ZUAIRINA):

Iya, Terima kasih.

Pak Ario Bimo Pimpinan dan Anggota Dewan Komisi VI yang kami hormati,

Pak Honesti dan Mitra kerja kami.

Satu yang mau saya tanyakan yaitu tentang tadi disampaikan oleh Pak Nusron Wahid jadi ada satu vaksin yang belum mendapatkan *Emergency Use Authorization* vaksin Cansino, karena vaksin jenis ini belum pernah digunakan sebelumnya, belum pernah digunakan sebelumnya. Agar dapat kejelasan bagaimana koordinasi lintas instansi terkait dan kapan BPOM akan mengeluarkan UE atau mendapatkan izin ya izin edar itu dan tentu ini kan tidak belum pernah dipakai Pak sehingga tidak menimbulkan masalah baru di masyarakat seperti yang terjadi pada vaksin AstraZeneca, itu Pak jadi vaksin Cansino yang belum mendapatkan *Emergency Use Authorization*, terus satu Pak.

Yang kedua Pak yaitu tentang sebentar Pak, vaksin merah putih yang digadag-gadag akan digunakan dalam vaksinasi Covid-19 ya ini bagaimana progresnya dan kapan kita akan bisa gunakan.

Lalu yang ketiga Pak tadi sudah disampaikan oleh Pak Deddy. *Holdering* BUMN Farmasi harus membangun sistem yang terbuka Pak, jadi memang pendataan, distribusi, pelaksanaan, serta edukasi vaksinasi itu harus sama warga itu jadi familiar gitu Pak. Ini kan kalau kita lihat di *hoax* ini Pak seram Pak ya habis divaksin sebulan kemudian meninggal gitu Pak, apalagi AstraZeneca ini kan ya katakanlah *hoax* Pak tapi dari pemerintah harus apa nih ya meng-*counter* dan juga harus membangun sistem yang terbuka Pak gitu untuk menjelaskan vaksin ini.

Dan terus terkait dengan program vaksin gotong royong Pak. Kemarin saya dengar ada harganya satu juta padahal harganya tidak sampai satu juta ya vaksin gotong royong itu, ya jadi ini juga dipastikan Pak masalah harga.

Dan terus juga Pak apa namanya Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Nah ini Pak apakah ada perbedaan yang nampak orang yang sudah divaksin sama orang yang belum vaksin, ini juga harus ada kejelasan Pak gitu ya tadi kaitan dengan tadi yang disampaikan di awal tadi, ini juga.

Terus juga terakhir yang Kimia Farma, Kimia Farma tadi sudah disampaikan mungkin kami membutuhkan auditor independen Pak untuk semua yang apa lab-nya mungkin yang lainnya dan untuk Indofarma singkat kata yaitu apakah sudah menggandeng UMKM ya untuk menghasilkan APD, walaupun sudah mungkin kami membutuhkan datanya Pak.

Terima kasih itu saja Pimpinan.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRİ HANTERU SITORUS, M.A.):

Mas Bimo 2 detik saja saya terlupa tadi.

Mungkin ada cerita jelek, tapi Kimia Farma juga punya cerita yang baik Pak. Kemarin saya minta tolong sama teman-teman di Bio Farma karena ada mahasiswa dari Kalimantan Utara yang terpapar Covid di satu rumah di Jogja dari asal Kaltara dan teman-teman dari Kimia Farma datang untuk melakukan *Home Care Service* ke mereka *rapid test*-nya. Terima kasih buat Kimia Farma.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Silakan ke sisi kanan, Pak Lamhot.

F-P.GOLKAR (LAMHOT SINAGA):

Terima kasih Ketua.

Bapak Pimpinan, Bapak Ibu Anggota Komisi VI yang saya hormati.

Para Direksi Bio Farma, Indofarma, Kimia Farma dan seluruh jajaran yang saya hormati dan yang saat ini sangat sibuk mengurus soal vaksin kita.

Pertama yang saya mau tanyakan Pimpinan adalah soal distribusi. Tadi Pak Dirut Bio Farma menyampaikan bahwa sampai saat ini kita sudah memiliki vaksin 73 juta Pak ya kalau nggak salah 65 per hari ini datang 8 juta, 73 juta. Sementara yang baru tervaksin itu adalah 25 juta, begitu Pak ya? berarti kan ada sekitar 50 juta vaksin yang sudah ada, tapi belum divaksin. Nah, pertanyaan saya ini kan kok jumlah ini menurut saya agak besar sekali ini Pak, kita punya 73 juta sementara yang tervaksin 25 juta, 50 juta lebih, apakah karena ada masalah di sini Pak? Misalnya, apakah karena pendistribusiannya yang sangat sulit dan lain sebagainya sehingga *gap* antara yang tervaksin dengan jumlah vaksin yang tersedia ini sangat besar sekali gitu, itu yang pertanyaan saya pertama.

Yang kedua adalah lagi-lagi masalah distribusi. Tadi Pak Dirut mengatakan bahwa Bio Farma dan Bio Farma grup itu mendistribusikan vaksin itu adalah hanya sampai ke tingkat provinsi, begitu Pak ya? Sudah sampai ke kabupaten kota dengan melibatkan sektor swasta. Nah, berarti ada *nggak* sistem distribusi yang melakukan monitor distribusi ini ya, misalnya dengan *QR Code*-nya atau apa gitu seperti yang dibilang Pak Deddy tadi jangan sampai ketika dari provinsi misalnya ke kabupaten ada yang memanfaatkan ini menjadi celah bisnis lalu kemudian vaksin itu adalah vaksin palsu.

Nah, kalau ini tidak ada sebuah sistem layanan yang bisa memonitor pergerakan dan seluruh vaksin ini yang 75 juta dan berikutnya nanti sampai tambah lagi ini bahaya Pak karena tadi Bapak katakan bahwa sistem yang dilakukan oleh Indofarma dan kawan-kawan ini adalah hanya sampai ke tingkat provinsi walaupun sekarang kabupaten kota dengan

melibatkan sektor swasta. Pertanyaan saya adalah untuk menjamin bahwa distribusi ini bahwa vaksin ini seluruh vaksin yang dibeli oleh pemerintah ini sampai ke tangan masyarakat dengan benar ada *nggak* sistem layanan yang melakukan *monitoring* dalam rangka distribusi ini itu yang menjadi pertanyaan saya, ini tujuannya adalah untuk menghindari vaksin palsu di tengah-tengah masyarakat.

Yang kedua adalah pertanyaan kedua korelasi tentang vaksin gotong-royong Pak saya hanya menitip Pak jangan sampai nanti begitu diberlakukan kalau dari angka ini sih masih 77.000 Pak ya walaupun dikatakan target itu sampai 30 juta padahal sampai per hari ini masih 77.000 masih jauh *gap*-nya. Nah, saya cuma mau nitip Pak jangan sampai mengedepankan aspek bisnisnya di vaksin gotong royong ini, ini sangat penting titipan saya jangan sampai mengedepankan aspek bisnis dalam rangka melaksanakan vaksin gotong royong ini. Tadi dikatakan bahwa 25% BUMN 75% swasta, saya *nggak* tahu ini perbandingan ini udah udah proporsional apa *nggak* gitu apakah terlalu banyak 25% BUMN saya *nggak* tahu secara kuantitasnya seperti apa, tapi saya berharap agar tidak mengedepankan aspek bisnis dan dibuat proporsional itu yang titipan saya Pak.

Yang ketiga ini menyangkut Pimpinan karena saya dengar dalam waktu dekat Bio Farma akan *go public* ini kaitannya terhadap proses vaksin ini kan bagaimana ini? Apakah misalnya nanti bisa digaransi bisa dijamin bahwa pelaksanaan proses vaksinasi kita khususnya dalam penyediaan sampai distribusi ketika nanti-nanti Bio Farma ini sudah *go public* tidak akan terganggu dan lain sebagainya, ini juga perlu jaminan buat kita. Kalau memang nantinya itu berdampak atau terhadap proses vaksin saya kira mungkin lebih bagus kita fokus dululah di dalam proses vaksin ini, nanti setelah ini lewat baru kita bisa masuk ke untuk *go public*.

3 pertanyaan itu aja Pak Ketua Pak Ario Bimo yang baik hati.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Lamhot.

Selanjutnya Pak Abdul Hakim.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Terima kasih Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang hadir secara fisik maupun secara virtual.

Yang saya hormati Bapak Dirut Bio Farma, Bapak Dirut Kimia Farma, dan juga Bapak Dirut Indofarma.

Saya mulai dari Indofarma terlebih dahulu. Jadi, kemarin saya sempat melihat laporan keuangan dari Indofarma tahun 2020 Pak itu dengan aset maaf dengan omset Rp1,7 T itu dibukukan laba tahun 2020 adalah Rp30 juta. Jadi, industri farmasi di tengah pandemi ini kan penjualannya meningkat, akan tetapi ada yang lucu dari kinerja perusahaan Bapak itu hanya membukukan keuntungan Rp30 juta yang dibagikan ke pemerintah hanya Rp27 juta nanti saya coba dikoreksi kalau keliru. Nah, itu mengapa kok bisa terjadi seperti itu Pak?

Kemudian jika dilihat dari *trend* harga saham dari perusahaan yang Bapak kelola itu di awal-awal tahun itu *trend*-nya naik kencang *wus wus wus* gitu kemudian turun *jles* seperti itu Pak. Nah, itu kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Berarti kinerja perusahaan yang Bapak kelola itu hanya dipengaruhi oleh sentimen positif berarti fundamentalnya bobrok, itu nanti coba dijelaskan Pak. Dan kemudian kami ada istilahnya itu ada temuan nanti akan disampaikan oleh Bapak Daeng Muhammad anggota fraksi kami terkait adanya fraud di apa perusahaan Bapak, itu untuk Indofarma terlebih dahulu.

Kemudian yang kedua ke Kimia Farma. Saya tidak akan membahas soal yang Kualanamu karena tadi udah dipersilakan sama Pak Ketua. Kurang lebih sama Pak terkait laporan keuangan di 2020 jadi omsetnya Bapak di 2020 Rp10 T, tapi hanya membukukan laba tahun berjalan itu Rp20 miliar. Nah, kalau hitungan hitungan bodoh saya Pak ya itu Rp20 miliar dibagi jumlah gerai Kimia Farma yang ada yang ada di seluruh Indonesia 45.000 itu berarti hanya berkisar Rp455.000,- keuntungan per gerai itu hitungan kasar saya saja Pak ya. Padahal kalau dibandingkan dengan perusahaan farmasi yang sejenis anggap saja Sidomuncul itu, dia omset penjualannya di tahun 2020 Rp3 triliun tapi dapat membukukan laba tahun berjalan Rp900 miliar. Nah, nanti coba dijelaskan bagaimana tata kelola di perusahaan Bapak seperti itu.

Kemudian selanjutnya ke induknya ke Bio Farma. Jadi, untuk vaksin gotong-royong Pak Pak Honest, kami dari Fraksi PAN ingin melihat secara utuh struktur daripada biaya vaksin gotong royong. Dijelaskan di sini untuk dua kali vaksin itu kan Rp880.000,- *delapan ratus tujuh puluh sembilan sekianlah* Rp880.000,-. Kami ingin tahu secara detail struktur pembiayaannya struktur penentuan harga Rp880.000,- karena yang sempat kami dengarkan itu bahwasanya boleh ngambil untung sekitar 20%. Padahal prinsipnya gotong royong ini itu pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta untuk menyukseskan vaksinasi. Nah, jangan sampai program vaksinasi ini vaksin gotong royong ini itu dikomersialisasi. Jadi, kami dari Fraksi PAN ingin tahu secara detail struktur biayanya, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua Pak Honest, mengapa tadi di penjelasan atau mungkin saya terlewat itu tidak dijelaskan terkait vaksin merah-putih? Itu program yang sengaja diadakan biar kelihatan nasionalismenya atau memang sudah ada *progress*-nya tapi belum dilaporkan vaksin merah putih. Karena kalau kita melihat rapat-rapat sebelumnya vaksin merah putih, vaksin merah putih, tapi mana Pak? Kami belum lihat dari tadi di mana di penjelasan Bapak, itu yang kedua.

Kemudian yang ketiga Sputnik Pak kok saya dengar itu ruwet Pak ya? Banyak apa banyak kepentingan atau banyak pihak-pihak yang apa istilahnya *nggak nggk* tahu kalau yang muda-muda gini tuh kadang-kadang *nggak* tahu kalau ada ruwet-ruwetnya gitu nanti mungkin bisa dijelaskan sama Bapak.

Itu untuk Bio Farma, Indofarma dan Kimia Farma. Jadi sekali lagi mudah-mudahan proses vaksinasi ini bisa berjalan dengan lancar, distribusinya tolong diawasi juga, vaksinasi gotong royong juga pro terhadap pelaku usaha UMKM, dan juga jangan sampai nanti pengusaha-pengusaha itu motong gajinya daripada karyawan-karyawannya. Dan titip Pak Dirut sebagai Bapak Direktur Utama *holding*-nya, jadi kalau ada salah di *subholding*-nya ada bobrok ada mandulnya itu yang keliru Bapak karena dia Undang-undang BUMN 9/2003 itu dijelaskan kan anggota direksi itu harus sesuai dengan kompetensi a, b, c, d, e. Jadi, kalau ada salah di anaknya itu induknya juga pasti kena, seperti itu.

Matur nuwun sanget. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya kami persilakan Pak Nyoman Parta. Mohon dipersingkat saya harus mengatur waktu.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Pimpinan beserta seluruh Anggota Dewan.

Bapak Ibu dari BUMN Farmasi Kimia Farma, Bio Farma, maupun Indofarma.

Saya ingin menyampaikan tiga hal. Yang pertama bahwa di lapangan antara vaksin AstraZeneca dengan Sinovac ini terjadi rival dirivalitaskan karena ketidakmampuan dari pihak BUMN Farmasi maupun Kementerian Kesehatan untuk menjelaskan secara utuh. Di satu sisi ada tempat vaksin yang sedikit dihadiri karena menggunakan Sinovac, tapi di sisi yang lain juga ketika dirivalitaskan dengan AstraZeneca juga orang tidak mau datang apalagi informasi di TV misalnya mendadak ada penghentian penggunaan vaksin dan lain. Ini mohon diperbaiki agar di lapangan masyarakat mendapatkan informasi yang utuh tentang vaksin ini.

Yang kedua kita punya pengalaman Bapak Ibu tentang penggunaan-penggunaan program yang bersubsidi. Contoh misalnya agak memakai perbandingan kita pernah punya sampai sekarang BBM bersubsidi akhirnya terjadi penyelundupan karena ada harga yang tidak bersubsidi, kita juga pernah punya sampai sekarang juga punya program gas bersubsidi terjadi pengoplosan karena ada harga di luar yang harga subsidi. Nah, ini saya khawatir juga dalam bentuk yang sama ini ada vaksin gratis dan ada vaksin gotong-royong yang difasilitasi oleh para pengusaha, ini ada sudah pernah terjadi dalam bentuk program yang lain saya kuatir ini program yang gratis

justru nantinya diperjualbelikan untuk kebutuhan program vaksin gotong royong. Ini mohon dijaga, dikawal agar tidak terjadi.

Yang terakhir Bapak, Ibu. Kami ingin menyampaikan bahwa Bali mengalami kontraksi ekonomi yang luar biasa, sudah tiga kali dijanjikan akan dibuka pariwisatanya termasuk juga oleh Bapak Presiden yaitu bulan Juli yang akan datang jadi dua bulan lagi. Kami mohon untuk mempercepat proses itu, kami mohon dari pihak BUMN Farmasi 3 BUMN ini berkolaborasi untuk memberikan *support* agar proses vaksinasi maupun penyediaan vaksin lebih diprioritaskan karena memang kondisinya sangat terpuruk. Selanjutnya juga dilakukan pengurangan pembatasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Swab PCR maupun Antigen, sepanjang ini begitu ketat orang tidak akan mau datang ke Bali. Jadi mohon ini perhatiannya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Nyoman Parta.

Selanjutnya Pak Daeng Muhammad.

F-PAN (DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Direktur Bio Farma,

Yang saya hormati Direktur Kimia Farma,

Yang saya hormati Direktur Indofarma,

Pertama-tama mungkin saya mengapresiasi dengan kerja-kerja yang dilakukan selama ini, tapi persoalannya banyak persoalan yang muncul ketika selama ini kaitan dengan program maupun vaksinasi yang terjadi di negara kita.

Persoalannya adalah satu menurut saya cara pandang saya adalah semua target pemerintah, keinginan pemerintah berkaitan dengan target-target apapun itu harus didukung oleh manajerial yang oke, manajemen yang oke itu juga harus didukung oleh kepemimpinan yang oke. Kenapa saya bilang seperti itu? Anda punya *goodwill* punya niat baik, anda punya strategi bagus, tapi kalau itu tidak didukung oleh manajemen personal yang bagus maka persoalan itu tidak akan selesai itu yang saya garis bawahi. Kenapa saya bilang seperti itu? Pertama adalah gambaran ketika kemarin ada RUPS juga di Indofarma saya dapat informasi seperti itu saya baca datanya Indofarma omset Rp1,7 triliun misalnya asetnya kalau tidak salah Rp1,3 triliun atau berapa gitu, keuntungan bersihnya hanya Rp30 juta, Rp30 juta dibagi 12 bulan itu sama dengan tukang cilok Pak, cilok Pak.

Saya berpikir begini, persoalan-persoalan yang terjadi termasuk kasus di Medan ada persoalan manajerial, persoalan bagaimana sebetulnya ketika Bapak-bapak menjadi Pimpinan sebagai Dirut di situ Bapak bertanggung jawab untuk meng-*upgrade* BUMN Farmasi kita karena semua kita berharap Pak BUMN Farmasi ini akan bangkit bahkan mendapatkan *benefit* lebih ketika

kondisi Covid karena semua Farmasi perusahaan-perusahaan Farmasi dunia mengambil *benefit* dari kondisi-kondisi sekarang. Harapan saya juga adalah saya banyak informasi karena kebetulan Indofarma juga Pak Dirut mohon maaf saya orang Bekasi sebelum Indofarma dibangun saya sudah tahu tanah itu, jadi saya cukup mengerti betul.

Satu contohlah kenapa saya soroti Indofarma, ada 1600 karyawan di sana kalau tata kelola manajerial Indofarma tidak diperbaiki Pak kalau 1600x3 orang saja ada yang hidup di sana, harus diselamatkan bagaimana Indofarma mampu di *manage* lebih baik lagi. Bapak sudah tahu 2 tahun ya di menjabat sebagai Dirut di Indofarma, Bapak-bapak juga yang lain sudah menjadi Dirut di Kimia Farma dan Bio Farma, tapi bagaimana pengelolaan Farmasi kita BUMN Farmasi kita yang saya harapkan itu ketika kondisi sekarang itu mampu mengambil momen untuk perbaikan karena ini menjadi harapan kita. Bagaimana konsep kemandirian Farmasi kita, kemandirian kesehatan kita itu mampu dilakukan tidak tergantung pada negara lain, itu yang paling penting.

Bahkan saya dapat informasi Pak Dirut Indofarma bahwa kaitan termasuk mesin-mesin produksi Indofarma itu nyaris banyak yang nganggur. Kedua, kaitan *stock inventory* misalnya banyak barang-barang yang menumpuk sebetulnya tidak terjual di Indofarma. Nah, kondisi-kondisi seperti ini sebetulnya artinya apa? Ada persoalan. Kalau menurut saya sih kalau semua persoalan yang terjadi kendala-kendala yang terjadi itu sebetulnya kuncinya satu, ada salah kelola dalam manajemen perusahaan. Nah, bagaimana itu bisa diperbaiki? Saya jujur saja tidak menyalahkan personal, yang saya inginkan cuman satu rasa sayang saya terhadap BUMN Farmasi, rasa sayang saya terhadap aset milik republik ini. Jangan sampai kondisi sekarang harusnya menjadi momen yang terbaik untuk kebangkitan industri Farmasi BUMN kita ini menjadi *Los opportunity* karena Bapak-bapak tidak mengambil kesempatan ini untuk memperbaiki kinerja.

Saya cukup tahu banyak sebetulnya sangat-sangat mungkin tahu banyak, tapi saya berharap ada *goodwill*, ada strategi untuk memperbaiki dari dalam sehingga semua mampu diselamatkan. Kan tidak lucu Pak kalau manajerial sebesar BUMN yang sudah tumbuh bahkan kalau Indofarma sejarahnya itu mungkin sudah 100 tahunan dari pertama berdiri zaman Belanda tapi kalau kinerjanya tidak diperbaiki.

Saya berharap Bapak-bapak ini orang yang saya pikir mampu dan bisa memperbaiki ini dan Insya Allah saya akan mendukung Pak kalau ini betul-betul diperbaiki, tapi kalau tidak ada perbaikan mungkin sebagai fungsi pengawasan di atas pundak saya ada konstitusi negara atas nama rakyat saya akan melakukan pengawasan yang cukup keras. Dan mudah-mudahan Bapak-bapak mampu menjadikan BUMN Farmasi ini mengambil momen yang terbaik untuk memberikan yang terbaik buat negara ini juga melindungi perusahaan ini tetap eksis terjaga karena jujur dengan kondisi-kondisi sekian banyak BUMN kita yang sebetulnya kelihatannya seperti baik seperti bagus tapi kenyataannya ternyata di dalamnya secara manajemen bobrok. Ini realita, saya punya fakta, saya punya data dan saya tidak asal ngomong, tidak asal bunyi karena saya cukup tahu betul saya paham betul.

Itu saja yang menjadi catatan tambahan Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya akan mengakhiri rapat pada jam 16.00 WIB.

(RAPAT:SETUJU)

Saya masih bagi dengan Pak Andre Rosiade, Pak Nasim, Pak Muhammad Muhammad Rapsel dan penjelasan dari mitra terkait dengan pendalaman, serta kesimpulan, maka mohon kepada kawan-kawan untuk mempersingkat waktu.

Selanjutnya kami persilakan Pak Muhammad Rapsel dulu.

F-P.NASDEM (MUHAMMAD RAPSEL ALI):

Terima kasih.

Pimpinan serta Rekan-rekan Komisi VI yang saya banggakan.

Direksi *holding* Farmasi beserta manajemen yang saya hormati.

Pertanyaan saya singkat aja bahwa tidak ter-*register*-nya Sinovac oleh WHO apakah itu terkait dengan persaingan politik antar negara *superpower* negara *superpower* misalnya antara Cina dengan Amerika Serikat.

Itu aja, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Singkat, padat. Saya kira Pak Andre juga singkat.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Saya paling 1 menit mas.

Pertama, terima kasih Pak Bimo Pimpinan, lalu jajaran Direksi Bio Farma. Iya Pak Honesti ini kakak kelas saya di Sumbar Padang, kalau Pak Demer mau puas sekalian gitu, iya meskipun senior.

Pak Honest, pertama saya ingin mempertanyakan tadi Pak Lamhot sudah mempertanyakan baru 25 juta orang yang divaksin padahal informasi yang kami dapatkan bahwa targetnya bulan Mei ini sebenarnya Bio Farma sudah mampu memproduksi 25 juta per bulan ya, kenapa ini sudah di akhir Mei masih baru 25 juta orang yang divaksin? Nah, saya ingin dijelaskan kepada kami di Komisi VI sebenarnya kemampuan Bio Farma memproduksi itu berapa per bulan? Karena kan saya dengar informasinya per bulan itu harusnya 25 juta, itu satu.

Yang kedua, tadi Gus Nusron sudah nanyakan bagaimana nasib orang mau umroh, mau haji ya. Nah, saya mendengar keterangan dari Kementerian

BUMN bahwa diinfokan bahwa Sinovac ini akan keluar sertifikat WHO-nya di bulan Mei ini setelah Sinopharm sudah keluar ya, ya rencananya di bulan Mei ini, nah tolong informasikan ke kami.

Yang ketiga ya hanya 30 detik lagi Mas. Saya ingin memastikan bahwa penerbangan itu bisa berjalan secara murah bagi masyarakat, Swab Antigen itu masih mahal ya masih Rp100.000 lebih. Kita tahu ada GeNose yang sekarang dioperasikan oleh Bio Farma grup ya melalui Farma lab, tapi saya juga dengar pihak Angkasa Pura masih membatasi kuota misalnya di bandara Lampung hanya 180 penumpang yang boleh pakai GeNose.

Kenapa GeNose ini dibatasi Swab Antigen masih dibuka? Kalau GeNose ini dipermudah tidak perlu pakai kuota di berbagai bandara ya otomatis kan bisa memudahkan penumpang tidak terlalu bayar mahal ya sehingga Garuda bisa pesawatnya penuh, Citilink juga penuh, karena mohon maaf kita ini Komisi VI komisi membidangi BUMN karena lawannya Garuda dan Citilink mulai memainkan menggratiskan Swab Antigen.

Nah, ya jadi saya minta Dirut Bio Farma bicara dengan Menteri BUMN dan Angkasa Pura ya untuk segera seluruh bandara itu dipasang GeNose saja dan tidak usah pakai kuota-kuota. Apa mau habisin jatah Swab Antigen dulu yang sudah dibeli oleh pihak lain baru GeNose-nya dibuka gitu loh, karena penumpang berhak untuk bisa terbang dengan harga yang murah. Jadi saya minta Pak Honesti bicara dengan Awaluddin dan Faik dan Menteri BUMN Erick Thohir *nggak* usah pakai kuota-kuotaan gitu loh ya karena penumpang berhak untuk terbang dengan harga yang murah ya.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Kami persilakan Pak Nasim. Waktu mohon dibatasi waktu.

F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):

Terima kasih Pimpinan, Bapak Aria Bimo tersayang.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Singkat saja saya Nasim Khan dari Partai PKB yaitu Penentu Pemimpin Bangsa yang intinya berharap kemaslahatan kepada umat itu yang pasti. Dan saya terima kasih pasti dikasih giliran terakhir sama Mas Bimo karena memang sekalian penutup dan doa biasanya kalau di PKB itu karena keputusan semua di PKB Pak dalam segala hal itu.

KETUA RAPAT:

Perlu dicatat Pak doanya Pak Nasim ini bagus Pak, doanya bagus.

F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):

Insyaa Allah.

KETUA RAPAT:

Persoalannya kabul atau tidak itu tergantung.

F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):

Nah insyaa Allah itu, itu semua keyakinan kita Insyaa Allah Pak.

Yang pertama-tama saya ucapkan Minal aidin wal faidin mohon maaf kepada seluruh jajaran Direksi Farma Indonesia saya tidak sebut satu-satu, tolong ikhlaskan bila ada saya salah dan anda juga pasti banyak bersalah kepada umat semoga umat memaafkan anda khususnya dalam hal segala hal kesehatan yang ada di Kementerian BUMN ini khususnya masalah vaksin masalah antigen yang sangat dirasakan oleh masyarakat.

Sampai sekarang masyarakat mengatakan bahwa, sangat penting Pimpinan ini menjadi kesimpulan nanti Pimpinan untuk dicatat. Masalah ini tidak bisa diremehkan *naudzubillah* kita banyak memang negarawan kita maaf ya oknum bangsa kita yang mempermainkan segala halnya tentang kemasyarakatan keumatan kemaslahatan khususnya di bidang kesehatan yaitu yang sekarang sudah terjadi yaitu vaksin dan antigen.

Bisa kami sampaikan Pak kami di PKB dan juga saya yakin dengan semua partai lain banyak masyarakat kita konstituen kita dikultur di bawah yang dimainkan dengan kepentingan bisnis global ini, apalagi dikait-kaitkan dengan politis dan lain-lain. Kami mohon kepada kementerian dan Farma grup ini untuk lebih berhati-hati seperti kesimpulan masa lalu yang sudah kami ingatkan, jangan memunculkan kontroversi di masyarakat baik itu vaksin, baik itu alat Swab Antigen dan lain-lain. Di tata, kita ini bangsa, kita ini negara ya kan bukan organisasi kecil kita sudah tahu bagaimana *recommended* internasional seperti tadi Mas Nusron sampaikan ya kan, kita nanti ada di jamaah kita mayoritas umat muslim Indonesia perlu ada berangkat haji, umroh, apa yang dibutuhkan ya.

Masyarakat kita memang tertekan sekarang Pak apalagi adanya perubahan revisi Perpres sudah keluar nih Pak Bimo untuk revisi tentang vaksin kewajiban vaksin ya kan ya sebetulnya ini nanti bertahap tidak bisa mendadak ya, seperti dulu kalau kita mau haji mau umroh ada meningitis nanti kita ada vaksin sebetulnya memang mau tidak mau harus dilakukan ya karena kesehatan.

Tetapi masyarakat itu tidak dipaksa mau dipaksa bagaimana karena kita ini pemerintah kita dan semua harus sinergi tidak bisa menyalahkan personal, oknum juga yang bermasalah juga banyak. Kita harus ada informasi, sosialisasi, koordinasi yang benar-benar gitu loh Pak ya kan, jadi masyarakat ini tidak takut. Ada dokter mengatakan beberapa oh nggak apa-apa vaksin orang isinya air kelapa kok nah iya kan, ada lagi yang mengatakan bahwa ini haram ada ini semuanya karena apa? Karena ini komunikasi sosialisasi yang *nggak* benar.

Tolong seperti kami dulu sampaikan jangan memunculkan kontroversi, apa yang layak dilakukan kita lakukan dan bila terjadi permasalahan-permasalahan kekeledoran atau oknum mengkriminalisasi seperti antigen itu seharusnya Pak Dirut dan Direksi dan jajaran itu sudah paham seharusnya saya yakin paham ada informasi itu pasti dan itu harus cepat ditindaklanjuti. Ini sinergi pentingnya sinergi eksekutif, legislatif, dan semua TNI-Polri saling mengawasi bersama ya kan, jadi tidak pecah jadi ketakutan masyarakat ini bisa diatasi gitu Pak ya.

Ini bisa kami katakan di PKB mengatakan masyarakat ini terjadi seperti ini apa ini kedzholiman Pak dzholim ini Pak iya kan, gara-gara Antigen palsu sehingga orang jadi korban dalam ini dzholim Pak kalau bisa dikatakan hukumannya sebetulnya kan mendzholimi ini manusia nyawa itu dihukum mati seharusnya ya kan *nauzubillahminzalik*.

Ayo tolong kita sadarkan, kita butuh hidup, kita ber sistematis kenegaraan tapi kita pikirkan bisnis juga berpikiran kemaslahatan. Itu tolong Pak jadi catatan segala hal ditata jangan memunculkan kontroversi. Apa yang dibutuhkan sekarang? Vaksin, oke. Mau diterima di mana, apa, bagaimana kategorinya, sistem kehalalannya keharamannya secara maksimal dicek ini sintetisnya secara haramnya hukumnya bagaimana, seandainya harus *pure* dari virus dari apa? Nah, bagaimana ini jadi enak semuanya.

Termasuk Antigen, ada tadi Antigen tiup Antigen apa yang terbaik yang simpel yang mana, ini mulai sekarang misalkan sudah bisnis datang ini harus habis kuotanya, nunggu, nah jangan dijadikan seperti itu, nah itu yang harus ditata.

Itu saya kira Pimpinan ini nanti jadi kesimpulan harus apa yang kita sampaikan kepada Kementerian BUMN, ada juga yang kepada pemerintah apa-apa hal yang sehingga tidak kebablasan semuanya. Saya kira itu Pimpinan, terima kasih. Insya Allah semoga menjadi manfaat dan bermanfaat buat kita semuanya.

Wallahul Muwafiq Illa Aqwamith Thariq.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya tinggal punya waktu 10 menit, terakhir Pak Herman Khaeron apakah masih bisa mengikuti?

F-PD (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Masih Pak Bimo.

KETUA RAPAT:

Saya pikir gambar ya dari tadi ternyata wujud hidup.

F-PD (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Masih Pak Bimo, menemani Pak Bimo dengan setia.

KETUA RAPAT:

Kami persilakan Pak Herman.

F-PD (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Baik, terima kasih.

Yang terhormat Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VI DPRRI.

**Saudara Direksi Bio Farma, saudara Direksi Indofarma dan Kimia Farma,
dan**

Bapak Ibu sekalian yang saya hormati.

Pertama saya masih belum mendapatkan jawaban yang pasti sesungguhnya seperti apa sih manajemen vaksinasi di Indonesia? Dan catatan ini sesungguhnya menjadi pertanyaan banyak orang gitu ya sudah sejauh mana, targetnya kapan, dan kemudian secara objektif masa kemampuan meningkatkan imun dari Sinovac itu berapa lama? Ini pertanyaan pertama pertanyaan yang fundamental yang menurut saya harus diyakinkan karena kalau tadi saya merujuk terhadap apa yang disampaikan teman-teman temannya Pak Nusron Wahid bahwa ada ketidakpercayaan terhadap vaksin Sinovac sehingga untuk ibadah Umrah saja kemudian tidak diakui gitu.

Ini yang menurut saya harus ada kepastian ya dari otoritas yang diberikan kepercayaan oleh negara untuk melaksanakan kegiatan ini, bukan hanya semata dari Kementerian Kesehatan ya saya kira sangat banyak persoalannya yang harus ditangani oleh Kementerian Kesehatan bukan hanya vaksin semata. Tapi Bio Farma sebagai induk perusahaan yang diberi penugasan oleh negara untuk menjadi operator pelaksana kegiatan vaksinasi di seluruh Indonesia tentu bisa menjawab gitu ya apa sebetulnya yang terjadi dengan Sinovac dan kapan kemudian masa berlakunya kapan terakhir. Saya sudah divaksin 2 bulan yang lalu, apakah masih berlaku setelah 6 bulan, setelah 7 bulan ya meski pada akhirnya seperti saya seperti keluarga saya sudah divaksin pun tetap menggunakan protokol kesehatan Covid.

Yang kedua, yang kedua pertanyaan saya bagaimana dengan vaksin gotong royong dan kemudian kenapa harus Sinopharm? Tidak membuka lebar-lebar untuk vaksin-vaksin lain yang telah teruji kemampuannya di negara-negara lain. Banyak hal yang saya tidak harus menyebutkan nama vaksin, tetapi kalau kemudian bahwa vaksin gotong royong hanya dilakukan dalam bentuk seremonial seremonial saja ya ini bagi saya belum memastikan bahwa sesungguhnya ada tanggung renteng agar target 80% atau tercapainya *herd immunity* yang ditargetkan oleh pemerintah melalui aksi korporasinya Bio Farma ini bisa tercapai. Saya menjadi pesimis gitu kalau kemudian banyak hal yang tentu informasinya tidak meyakinkan, tidak tidak memberikan kepastian kepada publik.

Yang terakhir supaya tidak mengganggu waktunya Pak Bimo karena Pak Bimo sudah ada janji-janji kelihatannya gitu ya.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Janjian sama Zulkifli Zaini dia.

F-PD (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Yang ketiga, saya tentu memberikan apresiasi ya. Jadi dua hal yang saya kritisi, tetapi saya juga memberikan apresiasi kerja keras dari BUMN ini. Tentu dengan berbagai persoalannya telah menjalankan penugasan pemerintah mudah-mudahan tidak rugi ya mudah-mudahan tidak juga mengambil untung terlalu banyak, tetapi tolong dikemukakan gitu bagaimana juga pengaruh terhadap korporasi dengan penugasan-penugasan ini? Ada banyak korporasi yang diberikan penugasan seperti Bulog menjadi rugi, ada penugasan lain yang diberikan kepada korporasi menjadi rugi. Bagaimana dengan penugasan-penugasan ini dan tentu tidak boleh rugi karena kalau rugi buntung semua, tapi kalau juga mengambil untung itu namanya mengambil kebahagiaan di tengah-tengah penderitaan rakyat.

Nah, oleh karena itu, saya kira ketiga aspek ini mohon Pak Honesti dapat memberikan respon dan memberikan kejelasan kepada publik gitu ya meski barangkali ada *domain* yang dibatasi terhadap komunikasi publik dari Bio Farma.

Saya kira demikian.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Dari meja Pimpinan.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):

Sedikit Mas.

KETUA RAPAT:

Kami persilakan Pak Demer.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):

Nggak enak juga orang dari Moskow ngomong, Pimpinan kita di sini nggak ngomong nggak enak juga.

Terima kasih Mas Bimo.

Yang saya hormati Rekan-rekan di Komisi VI, juga

Para Direktur Pak Direktur Utama Holding maupun anak usaha.

Saya hanya menambahkan dan menggarisbawahi dari apa yang disampaikan oleh teman-teman bahwa semakin lambat Bapak melakukan penetrasi terhadap vaksin ini, maka kerugian negara akan semakin banyak. Bukan hanya kerugian negara dalam bidang pengadaan vaksinnya tapi kerugian negara terhadap ekonomi kita terutamanya Bali yang sangat terpuruk dengan adanya pandemi ini dua kali lipat dari penurunan nasional. Nah, untuk itu percepatan ini sangat penting, ada hal-hal yang mungkin perlu disampaikan kepada kami yang memerlukan kebijakan kami di sini dukungan untuk Bapak itu tentu kami sangat mengharapkan itu sebenarnya tujuan daripada rapat kita hari ini, yaitu memantau vaksin yang sudah terpenetrasi ke masyarakat, yang kedua apa hambatan Bapak selanjutnya yang memungkinkan untuk bisa kita dorong melalui apa kebijakan di Komisi VI.

Hal lain juga saya minta nanti mungkin tercatat tertulis saja Pak mengenai anggaran PMN sudah sejauh mana Bapak pergunakan ya dibagi ke mana saja, kemudian anggaran dari perusahaan juga ya. Tentu tidak bisa menjawab Bapak jawab sekarang, nanti tertulis saja lewat ini lewat sekretariat untuk dapat kami pelajari lebih jauh dan nanti tentu karena kami akan menyusun RKP apa Pagu Indikatif ini tentu akan juga menjadi pertimbangan-pertimbangan untuk dalam penyusunan Pagu Indikatif di 2000 untuk 2022 kami sedang berjalan nih mau menyusun Pagu indikatif. Oleh karena itu, segera kami minta kinerja Bapak di bidang keuangan tentunya karena kita akan memasuki kepada apa siklus anggaran kita di Komisi.

Dan saya juga berharap kita ada gedung kalau nggak salah gedung Cisarua itu Pak gedung vaksin yang rencanakan dulu tapi karena ada sesuatu hal waktu kemarin ada badai di itu sehingga akhirnya apa tertunda itu, saya minta nanti melalui kementerian yang terkait untuk menjadi bagian dari pada Bio Farma sehingga nanti bisa segera mungkin itu dimanfaatkan untuk percepatan. Saya yakin ini pandemi akan berlama-lama ini karena setelah kita dapat vaksin, kemudian setahun kemudian kita mesti nambah lagi vaksin kayak vaksin flu burung, kayak vaksin *pneumonia* gitu Pak ya eh kok vaksin flu yang kita miliki dan vaksin *pneumonia*.

Nah, oleh karena itu, maka segala upaya untuk mengaktifkan untuk membangun vaksin ini tentu menjadi bagian yang cukup penting juga ya Pak ya karena kita tahu bahwa karena keterlambatan itu menyebabkan keterpurukan daya rusaknya tinggi Pak keterlambatan vaksin ini daya rusaknya tinggi sekali daya saing ekonominya sehingga itu saya harapkan kepada Bapak untuk segera mengaktifkan gedung vaksin yang di Cisarua. Kalau memang perlu dukungan lagi dari kami tentu kami siap untuk mendukung.

Itu aja, Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya ketinggalan satu *Cover Boy* kita belum tanya silakan Cah Bagus itu di-*mute* itu.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):

Di *mute*-nya, *mute*-nya.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Tolong yang orang ganteng di Komisi VI dibuka *mute*-nya.

KETUA RAPAT:

Dari sini? Dari sana masih di-*mute*. Suaranya kecil Pak, dikeraskan. Tidak terdengar, belum terdengar. Apa ya, mikrofonnya mikrofonnya belum, boleh boleh boleh.

F-PKB (TOMMY KURNIAWAN):

Terima kasih Pimpinan.

Masih masalah ya?

KETUA RAPAT:

Nggak nggak.

F-PKB (TOMMY KURNIAWAN):

Oh ya, terima kasih.

Pimpinan yang baik hati yang saya hormati, dan juga

Rekan-rekan Komisi VI yang saya hormati, serta

Dirut *holding* Farmasi yang saya hormati.

Saya sedikit saja nggak banyak saya hanya penasaran tentang statistik data vaksin sampai hari ini kira-kira secara jumlah vaksinasi itu jumlahnya meningkat atau menurun dari dimulainya vaksinasi. Kita kan *nggak* bisa menanyakan ini kepada Kementerian Kesehatan saya kira dari Direktur Utama Bio Farma mungkin bisa *sharing* karena tadi tidak ada karena angka yang ada atau yang diproduksi dengan angka yang sudah divaksin itu *gap*-nya sangat jauh sekali sehingga target dari Presiden dari pemerintah untuk bulan apa namanya bulan September sudah mencapai angka 130 juta yang divaksin ini masih sangat jauh. Kira-kira kendalanya selain distribusi apa tolong dipaparkan juga dijelaskan kepada kami karena untuk mempercepat tadi seperti apa yang dibilang oleh Pimpinan Pak Demer ini sangat penting sekali untuk memulihkan ekonomi kita.

Saya kira itu saja Pimpinan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya tidak banyak pertanyaan, hanya soal keterlibatan UMKM dan TKDN Pak triliunan rupiah yang kecret ke UMKM dan produk dalam negeri yang seperti apa kita sudah minta pada Kementerian BUMN untuk jajaran BUMN harus *leading* dan *leader* dalam urusan peningkatan *Produk Domestic Bruto* itu semua terkait bagaimana semakin mengecilnya impor kita dan bagaimana meningkatkan investasi lewat belanja BUMN untuk hal yang menyangkut bisa diproduksi dalam negeri bahkan itu sebagai *government indicator* untuk jajaran direksi, jajaran GM dan manajer untuk tidak segan-segan memecat atau mengeluarkan bagi jajaran Direksi BUMN yang maniak impor tidak mengedepankan produk-produk bahkan industri-industri dalam negeri.

Ini penting sekali dalam situasi pertumbuhan ekonomi kita yang betul-betul kalau tidak didorong di jajaran *stakeholder* ini berat, maka belanja APBN dan belanja BUMN harus lebih mengedepankan ini dan Komisi VI akan mencermati itu merupakan bagian daripada pengawasan. Saya kira itu.

Kemudian tadi saya katakan mana apa saja yang perlu dijawab yang yang lain-lainnya bisa dijawab secara tertulis tetapi yang terkait dengan kesimpulan rapat kita pada hari ini. Yang pertama tadi banyak ditanyakan mengenai sejauh mana kawan-kawan BUMN Farmasi untuk melakukan langkah-langkah ya terkait dengan permintaan Pemerintah Arab Saudi agar dapat memastikan bahwa jamaah haji kita Indonesia dapat memenuhi syarat apa yang ditetapkan atau vaksin apa yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi, kita proaktif untuk khusus bagi yang mau berangkat haji itu bagaimana.

Kemudian kita juga tolong diyakinkan sejauh mana vaksin kita ini dengan meledaknya pandemi di India dan Malaysia, gimana efektivitas vaksin kita yang ada saat ini dan tadi saya juga menyampaikan sejauh mana asuransi-asuransi yang memang mengalami efek samping akibat vaksin asuransinya oleh siapa itu ya walaupun itu vaksin gratis oleh yang bersangkutan. Kemudian dan keamanan dan distribusi vaksin harus diperhatikan benar agar vaksin tidak rusak terutama di daerah-daerah yang tadi spektrumnya Pak Dirut sudah sampaikan.

Dan tentunya tadi yang banyak menjadi pertanyaan adalah masalah mengapresiasi segera ada manajemen yang harus dibenahi, harus disempurnakan agar kejadian yang terjadi di Bandara Kualanamu tidak terjadi lagi. Dan ini sebagai salah satu *entry* masuk untuk hal-hal yang menyangkut perbaikan-perbaikan manajemen SDM peningkatan-peningkatan *training* mungkin juga peningkatan bukan hanya *hard skill*-nya tapi juga *soft skill*-nya bagaimana menarasikan ideologi Pancasila itu menjadi narasi membangun korporasi yang *modern*, tidak hanya benefit *corporate*, tapi bagaimana juga menyangkut hal-hal yang menyangkut *agent development* yang menyangkut

kepentingan perusahaan dan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat.

Soft skill ini yang hampir di seluruh BUMN mengalami penurunan sehingga tidak terbentuk *corporate culture* yang mampu memberikan *spirit* membangun korporasi dengan tetap mempunyai *value share value* membangun masyarakat dan bangsanya.

Saya kira menterjemahkan Pancasila dalam budaya korporasi modern itu hal yang sangat penting untuk ditradisikan di dalam korporasi BUMN saat ini. Itu saya kira yang perlu direspon Pak dan mungkin yang penting-penting untuk kita ambil kesimpulan. Waktu dan tempat kami persilakan dari Pak Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) selaku *holding*.

DIRUT PT BIO FARMA:

Terima kasih Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang kami hormati.

Baik.

Mungkin pertama-tama kami terima kasih sekali atas Rapat Dengar Pendapat ini, ini juga merupakan bagian fungsi kontrol dan monitor dari Anggota DPR terhadap kami dan kami memiliki komitmen untuk bisa memperbaiki semua ini biar tidak ada kejadian lagi ke depannya. Dan juga berbagai *improvement* yang tadi kami sampaikan itu juga akan kami lakukan secara transparan dan berkala juga nanti akan kita laporkan. Jadi terima kasih sekali lagi kepada dukungan kepada DPR agar kami juga bisa memberikan *performancy* yang baik ke depannya tidak hanya sebagai *Agent of Development* tapi juga sebagai bagian dari bisnis entitas yang tentunya akan memberikan dividen buat pemegang saham.

Baik, saya akan coba menjawab yang intinya saja nanti mungkin kami juga memberikan jawaban secara tertulis. Jadi pertama terkait vaksin haji Bapak Pimpinan dan Anggota DPR, jadi memang kebijakan dari Pemerintah Saudi ini akan muncul baru ya baru sekitar sebulan belakangan mereka memberikan suatu kebijakan bahwa vaksin yang mereka kasih *approval* untuk yang sudah penerimanya bisa masuk ke Arab Saudi itu baru vaksin yang dari Eropa dan Amerika jadi satu Pfizer, Moderna, Johnson and Johnson, dan AZ dan Indonesia sendiri baru memiliki 1 jenis vaksin yang sesuai dengan kriterianya Pemerintah Arab Saudi itu AZ atau AstraZeneca. Tapi memang kita juga lagi berproses seperti Sinopharm itu sudah mendapatkan EUA dari WHO, Sinovac juga lagi berproses dan kemarin kami masih berkomunikasi dengan Sinovac, memang ada satu data lagi yang diminta oleh WHO tapi mereka optimis minggu pertama atau minggu ke-2 Juni mereka juga akan mendapatkan EUA dari WHO.

Nah, tentunya kita berharap ini bisa kita komunikasikan dengan Pemerintah Saudi ya dengan kondisi seperti ini kalau mereka membatasi jenis vaksin hanya dari Eropa, Amerika itu sangat memberikan kendala bagi negara-negara terutama seperti Indonesia selama ini memang jumlah jamaah hajinya terbesar di dunia.

Jadi, memang perlu ada diplomasi juga antar negara dan kami juga sudah diskusikan dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan

dan Kementerian BUMN juga dan Kemenag bagaimana diplomasi ini nanti bisa menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Arab Saudi untuk memberikan tambahan *approval*. Karena kendalanya di kita sendiri seperti Pfizer memang belum ada ya, Johnson and Johnson mereka sudah bilang bahwa untuk 2021 mereka belum memiliki *supply* vaksin untuk Indonesia baru akan dimulai 2022. Nah, dari berbagai macam keterbatasan *supply* ini tentunya kami berkeyakinan Pemerintah Arab Saudi bisa memberikan kebijakan sehingga vaksin-vaksin yang sudah diberikan di Indonesia mungkin bisa menjadi bagian dari vaksin yang diterima juga oleh Pemerintah Arab Saudi, intinya memang ada diplomasi antar negara untuk bisa memasukkan vaksin yang ada di Indonesia ke Arab Saudi.

Tetapi kita juga punya *way out*-nya menurut saya karena kita sudah memiliki vaksin AstraZeneca juga ini mungkin menjadi opsi tinggal nanti diatur bagi jamaah-jamaah mungkin yang pernah sempat mendapat vaksinasi yang Sinovac nanti kita diskusikan dengan Badan POM dengan Komnas KIPPI dan juga dengan ITAGI, apakah mereka boleh diberikan vaksin AstraZeneca untuk bisa memenuhi persyaratan tapi ini nanti ada pertimbangan tertentu yang harus dipertimbangkan oleh ahlinya kami dalam hal ini akan memberikan semacam opsi saja. Jadi, kita masih menunggu mudah-mudahan Sinovac segera mendapatkan EUA seperti Sinopharm dan juga AZ sebagai *way out* kita dan tentunya kita harap ini bisa dikomunikasikan dengan Pemerintah Arab Saudi.

Iya Pak, seperti saya sampaikan tadi rencananya yang untuk Sinovac ini akan keluar di minggu ke satu minggu pertama atau minggu kedua Juni EUA dari WHO. Iya bulan depan ya.

KETUA RAPAT:

Bulan depan sudah ada kepastian?

DIRUT PT BIO FARMA:

Bulan, minggu pertama atau minggu kedua Juni Pak.

KETUA RAPAT:

2 Juni ya.

DIRUT PT BIO FARMA:

Iya minggu kedua.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Pak sebentar Pak. Kalau minggu pertama bulan Juni sementara kita sudah baca di berbagai media bahwa Arab Saudi sudah mencoret Indonesia kan itu. Nah maksud saya tolong ini dikomunikasikan supaya kita ini yang

mau mendaftar baik yang ngantri maupun Furoda ini benar-benar bisa berangkat tahun ini gitu loh Pak.

KETUA RAPAT:

Ya wilayahnya berbeda Pak itu di wilayah regulator Kementerian Agama dan Kesehatan serta Menteri Luar Negeri.

DIRUT PT BIO FARMA:

Iya, tentunya kami tanggungjawab kami yang memastikan bahwa semua vaksin-vaksin yang ada di Indonesia bisa mendapatkan EUA secepatnya dari WHO.

KETUA RAPAT:

Jadi usahanya ada yang ada saat ini tapi belum mendapat pengakuan ya? untuk yang berlaku untuk Pemerintah Arab Saudi *nggak* bisa kita minta untuk dua merek tadi khusus yang haji itu bisa *nggak*?

DIRUT PT BIO FARMA:

Ya itu mungkin itu mungkin diplomasi, diplomasi antar negara itu Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Dilakukan sekarang?

DIRUT PT BIO FARMA:

Iya sudah mulai seperti dari Kemenlu, ya. Kan ini juga iya Pemerintah Arab Saudi kan juga baru mengumumkan sebulan terakhir kan kita juga, dulu kan bagi kita yang penting ada vaksin dulu karena kita *nggak* memperdulikan masalah masalah kebijakan tapi seperti pertanyaan tadi, pertanyaan ada politis ya kita juga *nggak* bisa masuk *domain* seperti itu. Jadi kami akan menginformasikan lagi nanti mudah-mudahan secepatnya Sinovac juga akan segera mendapatkan EUA dari WHO.

Kemudian terkait efektivitas vaksin ya saya pikir kita masih melakukan studi lebih lanjut ya berapa lama nanti dia akan bertahan, berapa lama nanti juga akan memerlukan vaksin berikutnya, saya pikir ini akan ada studi lanjutan dan kita tentu bersandar kepada data-data *scientist* yang nanti akan muncul.

Kemudian juga terkait masalah kebijakan manajemen vaksin, ya saya pikir memang sebelum lebaran itu kecepatan vaksinasi kita pernah menyentuh 500.000 per hari Pak. Memang lagi turun ya pada saat ada isu embargo memang sedikit turun kemudian lebaran saya pikir sekarang

Kementerian Kesehatan mungkin sudah menyiapkan langkah-langkah berikutnya bagaimana kecepatan ini bisa kembali di 500.000 atau mungkin juga target satu juta. Tentunya nanti kita tunggu saja kami juga berkomunikasi terus dengan Kemenkes bagaimana kecepatan vaksinasi ini bisa kita percepat.

Dari hasil produksi sendiri tadi seperti pertanyaan dari Pak Andre memang kemampuan produksi kita per bulan sekarang 25 juta dosis per bulan ya ini sudah jadi total-total kita setahun itu bisa sampai ke lebih dari 250 juta dosis perbulan. Jadi memang isunya juga ada isu bahan baku ini juga kita masih walaupun sudah mulai kembali normal tapi tentunya kan menutup.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Mohon maaf Pak, Bapak dapat kiriman dari Sinovac berapa per bulan Pak?

DIRUT PT BIO FARMA:

Bervariasi Pak, kalau bulan ini kita dapat 16 juta dosis jadi memang masih di bawah kapasitas produksi kita ya, tapi kita akan berusaha untuk mendapatkan bahan baku yang lebih banyak dan juga tentunya berapa *supply agreement* yang kita sudah lakukan dengan AZ ataupun dengan Novavax ini juga bisa direalisasikan dan mungkin tambahan dari vaksin yang lain yang masih di *pipeline* yang belum selesai negosiasi mungkin bisa cepat dilakukan gitu.

Kemudian terkait *monitoring* komoditas vaksin ya ini yang kami lakukan selama ini memang ya itu tadi saya setuju yang disampaikan Bapak Pimpinan tadi masalah *soft skill* masalah integritas ya, sebagai apapun sistem yang kita kembangkan itu selalu ada *Human Interface* di sana gitu kan. Jadi memang yang kita monitor ini akan kita coba perketat, intinya sistem yang kami kembangkan adalah sistem yang menjamin kualitas mutu dan keaslian dari vaksin, sementara yang untuk sistem yang dikembangkan oleh pemerintah dalam ini Kemenkes dan BPJS itu adalah dari sisi target vaksinasi.

Ini yang kita coba integrasikan nanti sehingga benar-benar nanti vaksin yang diproduksi nomor *batch*-nya berapa, QR seperti apa nanti itu bisa kelihatan di kartu yang nanti diterima oleh masyarakat pada saat mereka sudah melakukan vaksinasi. Ini yang lagi kita coba integrasikan sistem produk yang kami bikin dan sistem kependudukan yang dibikin oleh BPJS ataupun *Pcare* dari Kementerian Kesehatan, ini kita *in progress* menuju ke sana. Tapi juga dengan adanya perbaikan sistem distribusi di mana kami juga mendapat tanggung jawab untuk sampai ke fasyankes, ini juga nanti ke depan akan memperbaiki.

Karena selama ini kalau sampai provinsi Pak kami terputus sudah dari provinsi kabupaten kotamadya dengan sistem yang dulu itu kami tidak bisa memonitor lagi dan itu menjadi tanggung jawabnya dari dinkes setempat. Nah, nanti dengan adanya kebijakan baru ini dan juga dari *improvement* dari sistem yang kita bikin mudah-mudahan ini nanti bisa memperbaiki mutu dan juga kehandalan ataupun kualitas dari vaksin itu sendiri sehingga tidak ada

lagi isu-isu pemalsuan ataupun nanti pemanfaatan vaksin program yang diperjualbelikan. Satu tujuan kita mengimplementasikan sistem ini adalah untuk menghindari hal-hal yang tersebut.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Pak, untuk mengomentari yang saya tanyakan tadi tentang yang program gratis digeser ke diperjualbelikan untuk program gotong royong.

DIRUT PT BIO FARMA:

Sebenarnya itu memang kita sangat menyayangkan ada kejadian seperti itu karena itu *nggak nggak nggak* boleh sebenarnya, karena untuk bisa mengeluarkan vaksin itu diberikan kepada layanan itu ada proses *requirement* yang ada dokumentasinya Pak ada prosedurnya ada SOP-nya, jadi memang ini murni oknum ya. Seperti kejadian di Medan kan murni oknum yang kebetulan mereka adalah orang yang memang menangani *inventory* itu gitu, jadi kembali mungkin fungsi kontrol dan *monitoring* ditambah dengan sistem IT ini akan membantu nanti untuk mengurangi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.

KETUA RAPAT:

Pak Dirut penegasan saja jadi mengenai vaksin gotong royong yang membeli dari Bio Farma itu korporasi atau lembaga ya?

DIRUT PT BIO FARMA:

Itu korporasi Pak.

KETUA RAPAT:

Ya dari kekeliruan tadi sangat dimungkinkan sangat kecil karena tidak dijual peritil kan, tapi kan penerima vaksin tetap gratis kan tapi gotong royongnya oleh korporasi atau lembaga.

DIRUT PT BIO FARMA:

Jadi mekanismenya seperti ini.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Pimpinan ini ini kan ada yang mengawal sampai ke puskesmas ini barang ini kan ada di puskesmas di tingkat rumah sakit ini akan dibawa ke gotong royong gitu loh.

KETUA RAPAT:

Nggak, lembaga. Ini yang boleh misalnya adalah seluruh korporasi BRI ya BRI yang vaksin gotong royong gitu kan.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Sebentar Pak, Mas Bimo saya mau klarifikasi juga. Tadi Wakil Bupati Tanah Datar lapor sama saya ada surat edaran Gubernur Sumatera Barat ke minta Kadis Kesehatan di Tanah Datar untuk memvaksin pegawai Bank Mandiri. Nah padahal setahu saya mereka kan BUMN ini dengan vaksin nanti gotong royong ya di berbagai, apakah boleh hal seperti itu Pak? Karena pertanyaannya jadi kan sebenarnya kan BUMN ini sudah menyiapkan anggaran untuk vaksin gotong royong yang notabene bukan Sinovac. Setahu saya KPK sudah memberikan arahan bahwa vaksin Sinovac itu untuk vaksin yang difasilitasi pemerintah, di luar vaksin Sinovac inilah vaksin gotong royong nanti yang dilakukan oleh KADIN merekomendasikan perusahaan-perusahaan. Tolong dijelaskan Pak.

Terima kasih Pak.

DIRUT PT BIO FARMA:

Memang ya untuk BUMN yang mendapat vaksinasi gratis itu yang masuk ke program *public* ini *frontliner* iya *frontliner*. Itu memang ya swasta dan BUMN yang kategori prioritas ketiga *frontliner* itu memang diberikan (*rekaman tidak jelas*).

KETUA RAPAT:

Teller gitu Pak ya, bahaya juga ya.

DIRUT PT BIO FARMA:

Ya, yang langsung berhadapan dengan *customer* itu memang dapat prioritas dan itu diperbolehkan, tapi sisanya itu gotong royong.

KETUA RAPAT:

Lanjut karena mitra kita PLN sudah datang. Lanjut Pak.

DIRUT PT BIO FARMA:

Iya. Jadi untuk vaksin gotong royong Bapak Pimpinan memang dibedakan, jadi langsung korporasi dan kita juga mengirimnya bukan ke korporasi Pak kita langsung mengirimnya ke tempat layanan vaksinasinya faskes yang sudah dituju oleh korporasi tersebut jadi tidak korporasi dalam hal ini hanya mengirim karyawan kemudian vaksinasinya dilakukan oleh petugas-petugas vaksinasi yang sudah ditunjuk.

Nah, mungkin terakhir untuk menghemat waktu terkait vaksin merah putih ini juga banyak ditanyakan tadi. Jadi vaksin merah putih ini memang masih berproses, kalau kita lihat dari *timeline* yang kita lakukan yang tercepat itu nanti mungkin EUA-nya ditargetkan ada di Q1-2022, jadi kita masih berproses. Iya karena memang yang lama itu nanti uji klinisnya Pak dan lagi uji klinis dalam kondisi seperti ini tantangan di lapangan untuk mengumpulkan relawan yang terlibat karena memang sebagian orang juga sudah mulai di vaksin gitu kan, jadi ini juga apa tantangan-tantangan yang kita harus carikan solusinya. Tapi menurut kami sih kami juga cukup *confidence* bahwa Q1-2022 nanti itu bisa dapat EUA-nya dari pemerintah dari Badan POM dan kami sendiri di Bio Farma sudah menyiapkan fasilitas produksi yang cukup untuk bisa memproduksi vaksin dalam negeri sehingga kita bisa mengurangi ketergantungan dari vaksin-vaksin impor.

Mungkin demikian Bapak Pimpinan yang bisa kami sampaikan, sisanya nanti kami akan lakukan proses jawaban secara tertulis.

Terima kasih.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih atas beberapa penjelasan dari pendalaman kawan-kawan Anggota Komisi VI.

Selanjutnya kami persilakan untuk ditampilkan beberapa pertanyaan-pertanyaan dari Anggota maupun Pimpinan dan beberapa sudah ada dijawab oleh Direktur *holding*, yang belum nanti langsung dijawab secara tertulis sebagai bahan pengawasan dan bahan rapat berikutnya Pak. Dari Sekretariat apakah sudah bisa ditampilkan dan persiapan *draft* kesimpulan.

Bisa kita lihat dari Pak Martin Manurung yang langsung dari Moskow ada 2 pertanyaan. Kemudian dari Aria Bima ada 2, dari Bapak Sumarjaya Linggih Pak Demer ada 4, kemudian Pak Deddy Sitorus ada 5,6, Pak Nusron Wahid tumben hanya satu biasanya 6, Ibu Nevi dapil terjauh ada 7 pertanyaan. Kemudian dari Pak Lamhot Sinaga ada 5, dan dari Pak Abdul Hakim ada 5, dan Pak Nyoman Suparta ada 3 Pak Nyoman Parta iya di Jawa kan Pak, ada 3. Kemudian Pak Daeng ada 5, Pak Muhammad Rapsel ada 1 tegas ya kan, kemudian Pak Andre Rosiade biasanya ada 8 pertanyaan kali ini separuh aja 4. Kemudian dari Pak Nasim ada 5, kemudian Pak Herman Khaeron ada 4, Pak Tommy ada 2 Pak Tommy Kurniawan ada 2 dan nanti kami serahkan kepada mitra untuk dijawab yang memang belum disampaikan dalam forum rapat ini.

Dan mohon ditampilkan *draft* kesimpulan Rapat RDP dengan Direktur PT Bio Farma, Direktur Utama PT Kimia Farma, dan Direktur Utama Indofarma Masa Sidang ke-V Sidang Tahun 2021 *draft* Kesimpulan. Nomor satu ini sangat normatif dan tidak perlu disampaikan ya tidak perlu ya. Langsung saja mengapresiasi langkah PT Bio Farma.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Pimpinan, izin Pimpinan.

Itu 5 langkah itu udah dijalankan atau belum kok tiba-tiba mengapresiasi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Nah makanya kok.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Kalau setahu saya mereka sudah lakukan pemecatan, yang kedua.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Itu menterinya Pak Andre dari menterinya dari menterinya yang melakukan bukan dari jajaran direksi mungkin bisa ditelaah lebih ulang Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Yang di mana Pak. Kok mengapresiasi apa Pak?

1. Komisi VI mengapresiasi langkah PT Bio Farma, PT Kimia Farma, PT Indofarma terkait tindak lanjut penyelesaian kasus pemalsuan antigen dengan melakukan langkah lima langkah pembenahan antara lain: Restrukturisasi Organisasi, Penguatan Sistem Layanan Digital, Sinergi dengan *Stakeholder*, Audit Sistem Pengawasan Internal, dan *Quality Assurance Officer*.

Mengapresiasi ini mohon Pak Dirut disampaikan apa sudah dilaksanakan semua dalam rangka tersebut.

DIRUT PT BIO FARMA:

Sebagian besar sudah dilaksanakan tapi masih *in progress* Pak.

KETUA RAPAT:

Masih on proses ya bukan mengapresiasi, mendukung. Mendukung langkah ya mendukung langkah ya setuju.

(RAPAT:SETUJU)

2. Komisi VI mendorong PT Bio Farma, PT Kimia Farma, PT Indofarma agar membangun dan meningkatkan sinergitas dengan lembaga/instansi terkait dengan, dengan lembaga/instansi terkait sebagai acuan pengambilan kebijakan ke depan dalam menjalankan

core business tugas yang diberikan oleh pemerintah ataupun pengembangan bisnis.

Pusing aku ini bikin kalimatnya ini. Pengambilan kebijakan ke depan dalam menjalankan *core business* ataupun pengembangan bisnis. Iya?

F-PG (NUSRON WAHID):

Sudah ini di-*drop* saja ini *nggak* masuk. Saya aja *nggak* paham apalagi orang yang mana yang lain.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Itu nomor 2 gimana sih ininya.

F-PG (NUSRON WAHID):

Yang namanya kesimpulan itu membahas masalah yang muncul dalam rapat yang disepakati, ini kita *nggak* pernah membahas ini.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Nggak dibahas nomor 2, nomor 3.

F-PG (NUSRON WAHID):

Dari saya bicara sampai siapa bicara *nggak* ada yang *ngomong* masalah untuk apa dimunculkan di sini.

KETUA RAPAT:

Hilang, hilangkan.

F-PG (NUSRON WAHID):

Hapus hapus dihapus saja ini kait mengkait.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Mungkin lebih ke meningkatkan *Good Corporate Governance* Ketua.

KETUA RAPAT:

Opo ne iki, kok Rumah Sakit Paru *opo iki*?

2. Komisi VI DPRRI mendorong PT Bio Farma, PT Kimia Farma, PT Indofarma Tbk agar memfungsikan gedung vaksin dari Pak Demer ya, Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor dan segera berkoordinasi dengan instansi terkait.

F-P.GOLKAR (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):

Bukan rumah Goenawan itu, yang rumah vaksin yang dibuat kemarin di Cisarua itu mas ya.

DIRUT PT BIO FARMA:

Mungkin fasilitas eks flu burung kayaknya Pak. Itu dulu fasilitas eks flu burung Cisarua di Cisarua.

F-P.GOLKAR (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):

Eks flu burung.

KETUA RAPAT:

Oh, gimana Pak Dirut, realistis ya ini ya?

DIRUT PT BIO FARMA:

Iya.

KETUA RAPAT:

Oke setuju ya?

DIRUT PT BIO FARMA:

Yang Rumah Sakit Paru-nya dihilangkan aja Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oh Rumah Sakit Paru-nya dihilangkan.

DIRUT PT BIO FARMA:

Jadi kalau kami boleh usul jadi kalimatnya menjadi, Komisi VI DPRRI mendorong PT Bio Farma untuk memfungsikan ya gedung eks eh fasilitas eks flu burung, eks fasilitas flu burung gitu aja.

KETUA RAPAT:

Sekarang apa bentuknya Pak?

DIRUT PT BIO FARMA:

Sekarang mangkrak Pak.

KETUA RAPAT:

Mangkrak?

DIRUT PT BIO FARMA:

Iya.

KETUA RAPAT:

Sudah jadi bangunan gelap itu.

DIRUT PT BIO FARMA:

Ada ada bangunan yang belum jadi.

KETUA RAPAT:

Terus diserahkan ke siapa?

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Kayak ini dong, kayak gedung Hambalang di itu Sentul.

DIRUT PT BIO FARMA:

Jadi prosesnya sekarang itu dalam proses *inbrenng* aset dari Kementerian Keuangan ke Bio Farma.

KETUA RAPAT:

Oke.

DIRUT PT BIO FARMA:

Bolanya sekarang ada di Kementerian Keuangan, jadi kita menunggu.

KETUA RAPAT:

Proaktif Pak ya, proaktif.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Pimpinan, dikit Pimpinan.

Pak Dirut itu kira-kira dengan memfungsikan yang rumah sakit itu iya kan gedung itu ya dengan dengan fasilitas yang ada lebih efektif yang mana sebenarnya Pak? Karena kan kalau memfungsikan ulang yang udah mangkrak kan timbul *cost* lagi itu *entar*.

Terima kasih.

DIRUT PT BIO FARMA:

Sebenarnya kita butuh lahan baru, fasilitas baru Pak. Sekarang kita *nggak* mungkin lagi dengan yang ada untuk dikembangkan sementara kita kan membutuhkan fasilitas baru untuk bisa membantu pemerintah dalam penanganan pandemi. Kalau kami harus nyari lahan baru lagi itu kan proses lagi, beli lagi, ini udah ada ini tinggal *inbrenng* aja sebenarnya gitu dan kita akan segera kita sudah punya *plan* mau diapakan itu aset.

KETUA RAPAT:

Oke, kita dorong ya. Nanti kita tinjau Pak kayak apa kalau banyak setannya kita *nggak* jadi Bapak bawa ke sini lagi kita putus itu kita cabut keputusan ini. Setuju ya?

(RAPAT:SETUJU)

3. Komisi VI DPRRI mendorong PT Bio Farma, PT Kimia Farma, dan PT Indofarma.

DIRUT PT BIO FARMA:

Usul Bapak Pimpinan, Bapak Pimpinan usul. Jadi ada 2 aset tidak hanya di Cisarua Pak yang di lahan Bio Farma pun ada *x-project* yang sama yang mangkrak juga 2 ini.

F-P.GOLKAR (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):

Dulu banyak setannya dulu ini sekarang sudah hilang setannya gitu maksudnya.

KETUA RAPAT:

Sudah hilang setannya, maksudnya mau dimasukkan kesimpulan sekalian? Di mana di Cisarua Bogor dan mana Pak? Cisarua Bandung Cisarua Bandung dan?

DIRUT PT BIO FARMA:

Biar sederhana Komisi VI DPR mendorong PT Bio Farma untuk segera berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mengoptimalkan fasilitas eks flu burung.

KETUA RAPAT:

Oke.

DIRUT PT BIO FARMA:

Gitu saja, itu sudah mencakup yang Cisarua sama yang di Bandung.

KETUA RAPAT:

Untuk memfungsikan gedung eks fasilitas flu burung titik.

F-PG (NUSRON WAHID):

Burung apa Pak itu Pak?

KETUA RAPAT:

Ini burung yang belum flu Pak. sekarang udah nggak flu katanya, udah ya cukup ya?

(RAPAT:SETUJU)

Kemudian kita masuk ke-3.

3. Komisi VI mendorong PT Bio Farma, Kimia Farma, dan PT Indofarma untuk memperbaiki manajemen yang lebih baik lagi agar dipahami seluruh sumber daya manusia yang ada agar kejadian yang terjadi di Bandara Kualanamu tidak terjadi lagi dan pelayanan di seluruh provinsi di Indonesia diberlakukan dengan sama untuk di semua BUMN Farmasi.

Saya tadi kan ada yang masuk perbaikan SDM tidak ada (**rekaman tidak jelas**) mana? termasuk restrukturisasi organisasi, penguatan, *nggak* ini khusus SDM Pak, ini tadi pembekalan *trainer and trainer-nya* itu.

F-PG (NUSRON WAHID):

Katanya tadi presentasi Pak Verdi sudah ada *training* AKHLAK dari ACT Pak Ary Ginanjar. Dari dulu sejak zaman Meneg-nya Pak Soegiharto itu ada itu dulu dulu namanya bukan (**rekaman tidak jelas**).

KETUA RAPAT:

Kalau materinya bagus tapi mungkin kurang *nandes* ya, jadi sampai ada kejadian yang kayak gitu.

F-PG (NUSRON WAHID):

Di mana-mana sampai nangis-nangis itu.

KETUA RAPAT:

Kalau saya tadi menyampaikan membangun budaya Pancasila, bagaimana Pancasila itu menjadi *value* dan *share value* setiap BUMN supaya bagaimana Pancasila diterjemahkan dalam budaya korporasi modern. Saya kira itu masuk masuk akal saja tapi mungkinlah kita terjemahkan di sini saya pengennya setuju tapi tidak hanya untuk kasus kejadian itu saja di BUMN di BUMN Kimia Farma tapi menjadi bagian yang tak terpisahkan untuk memaksimalkan kinerja di dalam peningkatan SDM untuk semua BUMN Farmasi. Saya kira cukup ya.

F-PG (NUSRON WAHID):

Pak Bimo. Sebetulnya kan masalahnya sederhana Pak Bimo, belajar dari pengalaman Kualanamu ini yang maling hanya di Kualanamu atau maling semua kan gitu kasarannya.

KETUA RAPAT:

Ya, wilayahnya tidak di politik Pak itu wilayahnya di hukum Pak, ini forum politik gitu loh. Mau maling di mana atau di mana bukan urusan kita urusan para penegak.

F-PG (NUSRON WAHID):

Nggak bisa, justru karena forum politiknya di sini kita ini *lesson*-nya kan belajar dari pemalingan di situ bagaimana supaya sistem pemalingan itu tidak terendus dan tidak terjadi lagi proses pemalingan karena itu kita meminta sama Direksi Kimia Farma sistem apa yang mau dipakai supaya pemalingan itu tidak terulang dan tidak merembet di tempat yang lain, kecuali semuanya maling bersama.

KETUA RAPAT:

Nggak, begini begini sebentar sebentar, saya saya kendalikan dulu. Kalau sistem itu sudah ada di nomor 1, tapi kalau yang ini lebih pada SDM atau HRD. Kalau HRD itu ada tahapannya Pak, SDM juga ada tahapannya dari *recruiting*, dari *training*, dari *maintenance*, dari *promotion*, dari membentuk produktivitas kerja karyawan secara individual atau membentuk produktivitas kerja karyawan secara korporatif. Itulah yang saya maksudkan di dalam kesimpulan ketiga ini lebih pada perbaikan yang terkait dengan SDM, terkait dengan *culture*, karakter, mentalitas ini yang sebenarnya membedakan antara 3 dengan yang di 1.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Itu boleh Mas, hanya saya ingatkan Mas Bimo mohon maaf nih. Sebenarnya kan sederhana urusan Swab Antigen di Kimia Farma di Medan itu *inventory*-nya bisa dicek dulu penjualan Swab Antigennya banyak, kok sekarang kosong masa Direksi Kimia Farma *nggak* bisa *ngecek inventory* itu tiba-tiba penjualannya turun gitu loh sederhana kok ini.

KETUA RAPAT:

Nah terus apa kesimpulan kita?

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Sistemnya sistem GCG-nya gitu loh mas, karena *inventory*-nya aja tiba-tiba *nggak* naik. Ya AKHLAK itu itu urusan Pak Erick aja *value core*-nya itu, kita sistem GCG-nya harus dibangun ya.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Nanti GCG itu meliputi yang soal laporan keuangan gitu Pak.

KETUA RAPAT:

Nah, terus itu nomor 1 kan jelas sekali itu. Masuk ya itu nomor 1 nomor 3 ke 1 ya?

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):

Jadi begini struktur organisasi itu adalah orang. Yang kedua juga yang pengawasan internal termasuk pengawasan orang juga di situ, jelas ya?

F-PG (NUSRON WAHID):

Nah, sekarang pertanyaannya saya satu Pak, ini semua itu udah dicek semua ke unit-unit yang lain belum itu supaya ini ini semua? Kalau perlu buat kesimpulan Komisi VI ya kan membuat khusus masalah ini Panja Khusus masalah ini untuk diaudit. Kalau belum kita merekomendasikan kepada BPK untuk meng-*audit* khusus penggunaan masalah swab maupun antigen, kan bisa jadi penggunaan yang lain itu tidak di swab juga bisa loh untuk melakukan audit investigasi kalau perlu untuk masalah ini karena ini menyangkut manusia Pak itu Pak.

KETUA RAPAT:

Iya, saya masukkan itu tetap ke satu Pak karena di situ ada Audit Sistem Pengawasan Internal dan *Quality Assurance Officer* ya.

F-PG (NUSRON WAHID):

Nah itu satu Pak Bimo, tapi langkah politik kita apa di sini?

KETUA RAPAT:

Ya begini aja, langkahnya untuk kasus ini secara khusus ini kita bicarannya vaksin umum ya. Jadi, saya sepakat bahwa untuk hal yang menyangkut masalah persoalan Kualanamu yang supaya tidak terjadi lagi ini sebenarnya kita mau tandaskan dalam satu kesimpulan, tapi teman-teman minta itu masuk ke 1.

F-PG (NUSRON WAHID):

Begini, begini saya usul.

KETUA RAPAT:

Kalau 1 ya tidak hanya menyangkut audit, ya menyangkut pengembangan SDM.

F-PG (NUSRON WAHID):

Saya usul ini ya, saya usul. Kan belajar dari pengalaman di Kualanamu ada tiga pelajaran, pelajaran pertama adalah case kriminal hukum murni urusan kepolisian, urusan APH kita *nggak* bisa ikut campur. Case kedua adalah urusan perbaikan Audit Internal, itu urusannya Pak Bio Farma anu Pak Honest sama Pak Verdi dalam rangka melakukan *Good Corporate Governance* sama Internal Audit sama *Quality Assurance* anu *Quality Assurance*-nya.

Tapi satu lagi menurut hemat saya langkah politiknya, meminta BPK untuk masuk melakukan audit kinerja berkaitan dengan kesalahan masalah ini, jadi ini hak Anggota DPR secara politik, supaya apa? Dari audit kinerja itu akan ketemu rekomendasi apa yang dilakukan oleh teman-teman Kimia Farma itu benar apa tidak dan hanya terjadi di Kualanamu apa tidak kita diizinkan tahu supaya anu lebih ke sana. Itu baru *statement* politik baru keputusan politik kalau itu, kalau yang lain ini keputusan internal.

KETUA RAPAT:

Oke, jadi kalau soal masalah BPK itu sudah menjadi kewajiban BPK untuk melakukan audit berbagai lembaga termasuk BUMN.

F-PG (NUSRON WAHID):

Beda Pak, yang namanya audit itu adalah audit yang bersifat laporan keuangan, murni, ada yang bersifat audit atas permintaan DPR atas case tertentu. Nah, saya mendorong pada kesempatan ini berkaitan dengan

kejadian di Kualanamu bagaimana Komisi VI ini mempunyai hak untuk membawa masalah ini meminta BPK untuk mengaudit masalah ini tapi dibatasi auditnya ya kan hanya khusus masalah implementasi praktik pelaksanaan swab dan antigen dan PCR antigen di lingkungan Kimia Farma.

Apakah hanya terjadi di Kualanamu saja atau juga terjadi di tempat yang lain iya kan, atau di klinik-klinik yang lain ya kan tidak hanya di Farmasi klinik-klinik karena hampir semua punya klinik loh Pak. Aneka Tambang punya klinik, Angkasa Pura punya klinik, semua yang mana yang melakukan ini semua itu. Saya kira itu Pak, supaya ini nggak jadi ini.

KETUA RAPAT:

Oke ini sebagai catatan nanti kita jadikan rapat bahan rapat catatan masukan catatan keinginan untuk audit ya dengan BPK terkait dengan kejadian Kualanamu ini jangan jadikan kesimpulan untuk yang audit. Catatan sebagai bahan rapat dengan Menteri BUMN besok hari Senin ya saya kira ini hanya mitra, masukannya sudah dijadikan catatan saja, sebagai bahan rapat dengan Menteri BUMN usulan untuk dilakukannya audit kepada BPK terkait dengan kejadian di Kualanamu audit kinerja dengan tujuan tertentu. Oke ya, itu dimasukkan sebagai catatan bahan rapat dengan Kementerian BUMN. Iya, lanjut lanjut atas.

Kemudian itu kita *drop* yang nomor 3.

4. Komisi VI DPRRI meminta pada PT Bio Farma, Kimia Farma, dan PT Indofarma untuk memberikan asuransi yang mengalami efek samping akibat vaksin.

Sebentar, ini tadi bukan masalah memberikan tapi kita menanyakan sebenarnya bagaimana dengan para peserta yang berdampak terhadap vaksin, kami persilakan kepada Pak Dirut.

DIRUT PT BIO FARMA:

Iya mungkin kami bisa merespon. Jadi sudah ada Perpres nomor 14 tahun 2021 bahwa untuk biaya pengobatan baik itu perawatan terkait Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi itu ditanggung pemerintah, ditanggung pemerintah.

KETUA RAPAT:

Ditanggung pemerintah.

DIRUT PT BIO FARMA:

Iya. Jadi kalau yang ikut JKN mereka di ditanggung oleh BPJS yang tidak ikut nanti ada APBN yang akan menanggung mereka, jadi bukan porsi kami.

KETUA RAPAT:

Jadi apa ini Pak?

DIRUT PT BIO FARMA:

Ya saya pikir.

KETUA RAPAT:

Untuk?

DIRUT PT BIO FARMA:

Nggak perlu masuk kesimpulan sebenarnya karena sudah.

F-PG (NUSRON WAHID):

Bio Farma disuruh kasih.

KETUA RAPAT:

Nggak, terus *nggak*, sikapnya apa udah? Apa ya udah itu risiko.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Kan udah dibilang sudah ada Perpres-nya masyarakat. Jadi, tanpa kita dorong pun pemerintah sudah melaksanakan aspirasi itu, kan udah dijelaskan sama dia tadi.

KETUA RAPAT:

Iya. *Nggak*, misalnya ini disuntik kegiatan oleh Kimia Farma ya mati di situ terus Kimia Farma *ngapain?*

DIRUT PT BIO FARMA:

Kita melaporkan bekerja sama dengan Komnas KIPI, jadi kita kita dengan dinkes setempat biasanya mekanismenya seperti itu. Kalau seandainya ada kejadian kita segera laporkan dengan dinkes dan nanti lapor Komnas KIPI, nanti Komnas KIPI akan melakukan investigasi apakah ini akibat vaksin atau mungkin akibat mungkin ada penyakit bawaan, iya segala macamnya.

KETUA RAPAT:

Apa ya memberikan, ganti kata asuransi. Intinya punya empati gitu loh ya intinya melindungi segenap warga negara dan seluruh tumpah darah pada

saat divaksin kalau ada kejadian itu ya kalau kita-kita bisa langsung ke rumah sakit Pak, kalau di Desa lah terus piye gitu loh.

F-PG (NUSRON WAHID):

Pak Bimo. Sebetulnya itu bisa yang usulkan Pak Bimo dengan catatan komponen harganya diubah.

KETUA RAPAT:

Nggak nggak nggak, yang ada dulu aja ini komponen harga lain lagi.

F-PG (NUSRON WAHID):

Kalau ini *nggak* bisa karena *nggak* ada memang. Tugas memberikan insentif asuransi.

KETUA RAPAT:

Bukan asuransi kata lain ini loh Pak supaya ada empati. Asuransi sudah *ndak* bisa sudah tahu.

F-PG (NUSRON WAHID):

Nah terus untuk apa dimasukkan?

KETUA RAPAT:

Ya sudah. Untuk itu iya kan, Farmasi membiarkan kepada hal yang mengalami efek samping karena vaksin gitu kan Pak. Bikin di sini, tidak perlu diperhatikan, biarkan saja yang mengalami efek samping akibat vaksin.

F-PG (NUSRON WAHID):

Begini loh, itu rekomendasinya usulannya kepada Pemerintah.

KETUA RAPAT:

Iya, makanya kita sebut.

F-PG (NUSRON WAHID):

Wadah pemerintah dalam hal ini adalah Perpres.

KETUA RAPAT:

Tadi kan sudah jelas dari Pak Dirut bahwa melakukan langkah apa Pak?

DIRUT PT BIO FARMA:

Melakukan *monitoring*. Kita melakukan *monitoring*.

F-P.GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Bahasanya Pak Dirut saja masukkan ke situ Pak.

F-PG (NUSRON WAHID):

Nih kalau saya belum usul. Kimia Farma apa Bio Farma *holding* ini untuk memberikan advokasi.

KETUA RAPAT:

Iya wes, kali ini rada cerdas Pak.

F-PG (NUSRON WAHID):

Lho memang dari dulu cerdas. Advokasi kepada orang atau korbanlah yang mengalami efek samping akibat vaksin.

KETUA RAPAT:

Akibat vaksin yang saat itu Pak ya. Kalau kemarin saya 4 hari kembang ya sudahlah urusan sayalah ya.

DIRUT PT BIO FARMA:

Biar lebih cantik edukasi dan advokasi Pak.

KETUA RAPAT:

Oke, sekarang saya cukup ya itu ya memberikan edukasi dan advokasi.

(RAPAT:SETUJU)

5. Komisi VI DPRRI meminta pada PT Bio Farma, Kimia Farma, dan PT Indofarma untuk memperhatikan kasus India dan Malaysia yang meningkat akibat varian baru agar juga memperhatikan efektivitas vaksin yang sudah disepakati.

Jadi *Mbok menowo* ada vaksin yang baru juga segera diakses Pak maksudnya begitu. Bukan hanya sudah punya vaksin yang ini ternyata ada varian baru untuk lebih proaktif mengantisipasi itu. Setuju ya?

(RAPAT:SETUJU)

Nomor 3 baru ini. Oh ya nomor 3 baru, lebih serius dalam memberikan rasa keamanan dalam distribusi vaksin terutama di daerah terpencil. Oh belum dibacakan.

3. Komisi VI DPRRI mendorong PT Bio Farma, PT Kimia Farma, dan PT Indofarma untuk lebih serius lagi dalam memberikan rasa keamanan dalam distribusi vaksin terutama di daerah terpencil.

F-PG (NUSRON WAHID):

Maksudnya apa itu Mas?

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Mas, Bio Farma itu tanggung jawabnya sampai kantor gubernur Mas sisanya itu pemerintah daerah, kan sudah dikawal polisi segala, apalagi kurangnya Bio Farma kerja? Masa kita suruh dia antar ke Kantor Puskesmas dia juga.

F-PG (NUSRON WAHID):

Memang adik kelas yang baik membela ini, luar biasa ini, konkret.

KETUA RAPAT:

Jadi pertegasan saja Pak Dirut ya. Ini begitu vaksin itu sampai ke gubernur ya? Tapi memang ada tempat penyimpanan Pak Gubernur? tadi sampai kabupaten kota, tadi sampai kerja sama dengan swasta, siapa yang menentukan tadi Pak penunjukan apa tadi Kemenkes atau?

DIRUT PT BIO FARMA:

Destinasi itu Kemenkes kita ngirim ke sana.

KETUA RAPAT:

Oh, jadi sampai mana Bapak? Loh kok malah kotamadya.

DIRUT PT BIO FARMA:

Cuma kan ke mananya itu kan.

KETUA RAPAT:

Jadi ini gimana ini? *Drop*.

ANGGOTA:

Di *drop* aja itu nomor 3.

KETUA RAPAT:

Drop.

(RAPAT:SETUJU)

Wes mana lagi? apa cukup kesimpulannya?

F-PG (NUSRON WAHID):

Satu Pak.

KETUA RAPAT:

Sebentar dulu Pak yang ini yang nomor 5? Nomor 5 dulu Pak Nusron.

5. Komisi VI DPRRI meminta kepada PT Bio Farma, Kimia Farma, dan PT Indofarma untuk terkait vaksin gotong-royong Komisi VI DPRRI meminta kepada BUMN Farmasi untuk memastikan harga tertinggi vaksin yang tentunya juga masih terjangkau oleh masyarakat serta lokasi pelayanan vaksinasi tidak tumpang tindih dengan program vaksinasi gratis pemerintah.

Ini kan bukan perorangan.

DIRUT PT BIO FARMA:

Jadi, kalau harga itu yang menetapkan Kementerian Kesehatan, kami hanya mengajukan HPP, HPP itu dievaluasi oleh BPKP hasil evaluasi dikirimkan Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan penetapan. Jadi kami tidak *margin* segala macam itu sepenuhnya ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

KETUA RAPAT:

Jadi hanya melaksanakan?

DIRUT PT BIO FARMA:

Iya. Yang kedua itu juga kalimatnya tidak relevan karena vaksin gotong royong itu bukan untuk masyarakat bukan individual tapi korporasi.

KETUA RAPAT:

Iya lembaga. Mana tadi? Oh itu. Vaksin, vaksin memastikan, ini harga *nggak* ada? (*rekaman tidak jelas*) BUMN Farmasi untuk memastikan, harga vaksin tertinggi hilang. Masih terjangkau hilang. Paling tidak terjadi tumpang tindih dengan program vaksinasi gratis pemerintah, hanya itu.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Pimpinan, kiri Pimpinan.

Mungkin juga dijelaskan juga aja kira-kira karena terkait HPP itu kan hasil korporasi dari BUMN walaupun nanti yang tentuin harga dari Kementerian Kesehatan, tapi kami rasa di Komisi VI juga perlu tahu sebenarnya HPP-nya dari yang Sinopharm sama yang satunya tadi itu berapa, karena jangan sampai judulnya gotong royong tapi harganya komersialisasi di sini.

KETUA RAPAT:

Harga yang transparan dan akuntabel.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Transparan.

KETUA RAPAT:

Ya begitulah.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Dijelaskan ke Komisi VI nantinya.

KETUA RAPAT:

Mana tadi, tolong di (*rekaman tidak jelas*) Pak.

Komisi VI DPRRI meminta kepada BUMN Farmasi untuk memastikan harga yang transparan dan akuntabel gitu aja Pak ya. Ini kan pada curiga terjadinya justru bisnis vaksin antar antar beberapa pengusaha yang ingin masuk divaksin gotong-royong ini, ya memastikan harga yang transparan dan akuntabel. Tentunya yang juga masih terjangkau masyarakat hilang dari tadi *diomongin gak dihilang-hilangin itu, ayo dihilangin itu namanya juga ya lokasi. Ini yang nyusunnya ampun-ampun mbok tambah isi*. Harga vaksin yang transparan dan akuntabel, juga masih terjangkau di masyarakat hilang Pak. *Aduh kok ini lambat banget sih belakang ini*. Transparan dan akuntabel serta, *sek sek sek*, serta supaya tidak tumpang tindih boleh?

DIRUT PT BIO FARMA:

Memang seperti itu Bapak Pimpinan. Jadi pusat layanan vaksinasi gotong royong itu tidak boleh sama dengan pusat layanan vaksin pemerintah biar tidak ada tumpang tindih ini.

KETUA RAPAT:

Iya, ini penegasan saja Pak. Serta lokasi pelayanan, serta lokasi pelayanan vaksinasi tidak tumpang tindih dengan program vaksinasi gratis pemerintah. Oke ya Pak ya?

(RAPAT:SETUJU)

6. Komisi VI DPRRI meminta PT Bio Farma, PT Kimia Farma, dan PT Indofarma Tbk dan pemerintah untuk melakukan negosiasi bersama Pemerintah Arab Saudi agar dapat memastikan bahwa jamaah haji dari Indonesia dapat memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi.

Jelas ya?

F-PG (NUSRON WAHID):

Begini Pak redaksinya Pak, usul Pak.

DIRUT PT BIO FARMA:

Kami ini akan memastikan bahwa vaksin itu mendapatkan EUL dari WHO tapi untuk memastikan ke Arab Saudi itu tugas pemerintah Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oke.

F-PG (NUSRON WAHID):

Saya usul begini Pak, saya usul begini redaksinya kalau boleh. Komisi VI DPRRI meminta jaminan kepada PT Bio Farma agar vaksin Sinovac yang dipakai di Indonesia segera mendapatkan sertifikasi WHO sehingga dapat diterima di masyarakat internasional termasuk pelaksanaan jamaah haji dan umroh oleh Pemerintah Arab Saudi.

DIRUT PT BIO FARMA:

Usul Bapak Pimpinan.

Kalau meminta jaminan susah karena kebijakan itu ada di WHO.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP):

Iya, berusaha maksimal kali.

KETUA RAPAT:

Berupaya maksimal.

DIRUT PT BIO FARMA:

Melakukan upaya maksimal gitu.

F-PG (NUSRON WAHID):

Tadi Pak Honest mengatakan minggu 1, minggu 2 aman itu betul apa tidak ini?

DIRUT PT BIO FARMA:

Dari Sinovac berdasarkan proses dokumentasi ke WHO. Jadi kalau kita melihat pengalamannya dari Pfizer, Moderna kalau dokumentasi itu udah sampai di sana itu *nggak* lama lagi akan keluar EUL-nya.

F-PG (NUSRON WAHID):

Nah, kalau ternyata minggu 1, minggu 2 meleset, wassalam?

DIRUT PT BIO FARMA:

Kami berkeyakinan mereka pasti akan dapat EUL itu cuma kan masalah *timeline*-nya ini kan yang yang jadi ini.

F-PG (NUSRON WAHID):

Nah, keyakinan Bapak itu bisa dijamin nggak di sini?

KETUA RAPAT:

Begini, intinya gini Pak. Wilayahnya Bio Farma ini bukan wilayah untuk bisa memastikan vaksin itu untuk mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Arab Saudi, sekarang lebih hanya responsif.

DIRUT PT BIO FARMA:

Karena yang mendaftarkan Sinovac, Sinovac.

F-PG (NUSRON WAHID):

Begini Pak. Saya nggak konsen hanya masalah Arab Saudi itu satu hal karena otomatis kalau sudah diterima WHO Arab Saudi terima, yang kita konsenkan adalah WHO. Kita itu dulu semangatnya ingin divaksinasi ini supaya kita ini diterima kalau bepergian tidak menjadi kerisauan oleh masyarakat internasional, kan gitu Pak.

KETUA RAPAT:

Oke paham Pak.

F-PG (NUSRON WAHID):

Paham kan.

KETUA RAPAT:

Jadikan catatan untuk rapat dengan BUMN. Saya kira tepat dari apa yang disampaikan Pak Pak Nusron cuma kita akan meminta mendesak kepada Menteri BUMN untuk yang penanggungjawab apa gitu lho itu untuk melakukan langkah-langkah gitu aja Pak. Kalau korporasi saya kira ndak.

F-PG (NUSRON WAHID):

Oke *nggak* masalah, intinya itu aja.

KETUA RAPAT:

Intinya bahwa mengoptimalkan lobi dengan Pemerintah Arab Saudi dan tentunya kalau toh memang ada vaksin yang bisa dipergunakan yang sesuai sah Pemerintah Arab Saudi juga kita akses kan, saya kira itu. Catatan ya catatan kepada Menteri BUMN untuk melakukan langkah-langkah negosiasi pada Pemerintah Arab Saudi, saya kira itu. Oke, lanjut ke atas lagi. Masukkan catatan, kemudian 7.

7. Komisi VI DPRRI mendorong *holding* Farmasi bersama lembaga instansi terkait agar mempercepat pengadaan vaksin. Komisi VI DPRRI mendorong *holding* Farmasi bersama lembaga/instansi terkait dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan, BPOM, dan LPOM-MUI agar mempercepat pengadaan vaksin Covid-19 sehingga dapat meminimalisir penyebaran virus Covid-19 dan memenuhi memulihkan perekonomian.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP):

7-nya dulu belum mas.

KETUA RAPAT:

Opo tho iki.

7. Komisi VI DPRRI meminta pada PT Bio Farma, PT Kimia Farma, dan PT Indofarma Tbk untuk merealisasi PMN. *Sopo thi sing bicara masalah ini.* yang diterima BUMN Farmasi Tahun Anggaran 2021 dan Rencana Kerja.

DIRUT PT BIO FARMA:

Progres PMN.

KETUA RAPAT:

Oh progres ya progres PMN untuk untuk progres PMN yang diterima BUMN Farmasi tahun 2021, kok dan Rencana Kerja Pemerintah sebagai dasar untuk menyusun.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP):

Perusahaan perusahaan itu, Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan. Bisa ditulis itu ditambah.

KETUA RAPAT:

Untuk progres PMN yang diterima BUMN Farmasi Tahun Anggaran 2021 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P.):

Agar disampaikan secara tertulis gitu saja *nggak* usah itu, itu kan jelas Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Komisi VI DPRRI meminta PT Bio Farma, PT Kimia Farma, PT Indofarma untuk progres PMN yang diterima BUMN Farmasi Tahun Anggaran 2021, Rencana Kerja anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagai dasar untuk menyusun pagu indikatif Tahun Anggaran, *opo tho iki tho, gimana korporasi pagu indikatif ini apa nih?*

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P.):

Jadi kalau nanti mereka minta PMN apa segala macam kita bisa tahu itu sudah apa dari anggaran mereka gitu.

KETUA RAPAT:

Disampaikan secara tertulis.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P.):

Tertulis yang sekarang ke kita yang tahun 2021.

KETUA RAPAT:

Oh, ada Pak?

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P.):

Ada dong pasti.

KETUA RAPAT:

Oke.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P.):

2021 itu RKAP 2021.

KETUA RAPAT:

RKAP tahun 2021, yang ini?

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P.):

Iya, 2021 itu.

KETUA RAPAT:

Disampaikan secara tertulis. Penyusunan pagu indikatif Tahun Anggaran 2021.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P.):

Nggak pagu indikatif 2022, tapi rencana kerja anggaran tahun 2021-nya kita bisa ini.

KETUA RAPAT:

Udah kan itu.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P.):

Udah.

KETUA RAPAT:

Nah iya.

F-P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., L.L.M.):

Tapi Ketua, Ketua itu redaksinya membingungkan sekali itu. Untuk progres apa untuk progres PMN. Untuk melaporkan progres penggunaan PMN.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P.):

Iya, progres penggunaan PMN.

F-P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., L.L.M.):

Iya.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P.):

Iya, tambah penggunaan, penggunaan itu. Oke.

KETUA RAPAT:

Oke. Progres penggunaan PMN yang diterima BUMN Farmasi Tahun Anggaran 2021. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai dasar untuk menyusun pagu indikatif Tahun Anggaran 2022 disampaikan secara tertulis. Oke, setuju.

(RAPAT:SETUJU)

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P.):

Anggaran kerjanya yang 2021.

KETUA RAPAT:

Makanya dari tadi tolong dicek di belakang itu, kan saya tadi ngomong 2021. Oke.

(RAPAT:SETUJU)

8. Komisi VI DPRRI mendorong *holding* Farmasi bersama lembaga/instansi terkait dalam hal ini Kementerian Kesehatan, BPOM, dan LPOM-MUI agar mempercepat pengadaan vaksin Covid-19

sehingga dapat meminimalisir penyebaran virus Covid-19 dan memulihkan perekonomian.

Ndak ada masalah.

(RAPAT:SETUJU)

9. Komisi VI DPRRI meminta pada PT Bio Farma, PT Kimia Farma, dan PT Indofarma Tbk untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lambat 10 hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPRRI.

F-P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., L.L.M.):

Ketua.

Ketua meskipun sudah di sesi kesimpulan saya minta perhatian satu menit Ketua, ini terkait tanggung jawab kita untuk menjelaskan kepada publik iya kan. Hari ini terkuak bahwa memang vaksin Sinovac yang digunakan di Tanah Air ini memang vaksin yang belum mendapat sertifikasi WHO. Berikan kami argumentasi bagaimana menjelaskan ini kepada publik.

Terima kasih Ketua.

DIRUT PT BIO FARMA:

Jadi dalam ketentuan WHO vaksin yang boleh diberikan kepada masyarakat itu yang dalam uji klinisnya efikasinya minimal 50%. Masalah EUL WHO itu masalah lain itu akan digunakan beberapa negara untuk mengatur tata kelola di dalam negara masing-masing seperti Arab Saudi karena dia pengen keamanan yang lebih dia minta ada EUL dari WHO, tapi negara lain juga tidak akan memaksa hal yang sama. Nah di kita kebijakan di kita, iya, jadi itu hanya sekedar tambahan Pak.

EUL itu hanya sekedar tambahan dari WHO tapi itu tidak melarang kita untuk melakukan vaksinasi kepada masyarakat karena kita sudah memenuhi *mandatory requirement* yaitu efikasinya minimal 50%, itu kita pegang. EUL itu, itu hanya tambahan persyaratan kalau seandainya memang ada negara tertentu yang meminta persyaratan itu.

Contoh Arab Saudi, Arab Saudi dia menambahkan harus dapat EUL karena dia pengen mendapat standar tertinggi sebenarnya meskipun sebenarnya itu tidak menghalangi kita juga untuk mengatakan bahwa Badan POM setempat itu sudah memberikan EUA terhadap vaksin tersebut. Jadi, ini memang masalah kebijakan negara masing-masing saja. Banyak vaksin juga yang mereka *nggak nggak nggak* mengurus EUL karena mereka juga tidak akan ada hubungannya dengan negara lain gitu loh, jadi ini kebijakan negara masing-masing saja.

KETUA RAPAT:

Itu pertanggungjawaban kelembagaannya begitu Pak ya mengenai vaksin itu.

DIRUT PT BIO FARMA:

Untuk kondisi normal biasanya kita tuh kebijakan ekspor biasanya ekspor itu negara tertentu minta ada izin dari WHO itu tambahan gitu loh.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Mungkin usul Pimpinan. Saya minta.

KETUA RAPAT:

Sudah saya kira jangan usul usul sekarang kita ke selanjutnya.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Ini penting juga contoh ini, saya kasih tahu. Masyarakat mungkin sosialisasi memang vaksin itu tidak 100% melindungi kita, tapi percayalah vaksin itu kalau orang yang sudah divaksin dua kali kalau terkena Covid itu dampaknya sangat ringan bisa OTG, itu perlu disosialisasikan oleh pemerintah contoh saya.

KETUA RAPAT:

Saya kira Pak sosialisasi yang paling efektif ajaklah Andre Rosiade ke manapun untuk bicara itu. Ya kita lanjutkan.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Karena contoh saya ini kan saya Covid mas, saya Covid tapi kayak orang OTG saya positif CTC-16 12 hari di rumah sakit tapi saya tidak merasakan gejala karena saya sudah divaksin Sinovac itu perlu disosialisasikan. Mungkin kita tidak terlindungi 100% tapi komorbid Asma seperti saya tidak merasakan Asma sama sekali waktu waktu Covid gitu loh Mas, itu penting Pak.

KETUA RAPAT:

Kesimpulan dari Pak Andre Rosiade yang terakhir nomor 10 eh nomor sembilan.

9. Komisi VI DPRRI meminta PT Bio Farma, PT Kimia Farma, dan PT Indofarma agar GeNose sebagai pengganti Swab Antigen diberlakukan di seluruh bandara tanpa harus ada pembatasan kuota untuk menghidupkan bisnis penerbangan dan sektor pariwisata.

Itu juga bukan wilayahnya dia Pak, catatan mas.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Begini Mas. Bio Farma ini bisa bicara dengan AP I dan AP II untuk mendorong bahwa tidak ada pembatasan. Contoh misal Bandara Lampung dia pakai GeNose, tapi hanya 180 penumpang yang boleh pakai GeNose sisanya *nggak* boleh pakai GeNose jadi ada kuota dibatasi. Maksud saya silakan masyarakat yang memilih mau GeNose boleh mau Swab Antigen boleh, tapi *nggak* usah dibatasi.

F-P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., L.L.M.):

Iya tapi, Ketua, Ketua. Tapi kan kita punya persoalan yang apakah ada hasil studi yang bisa membuktikan bahwa penggunaan GeNose lebih efektif.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Kan sudah dapat dari BPOM.

KETUA RAPAT:

Gini gini, makanya saya *nggak* ngerti. Kita mau tanya dulu Pak Dirut gimana Pak.

DIRUT PT BIO FARMA:

Ya saya pikir ini mungkin masih perdebatan ya, makanya kita juga tidak pernah membatasi kita mekanisme pasar aja sebenarnya gitu iya kan. Memang kalau kita mengacu kepada standar WHO *Gold Standard* itu adalah PCR Test, memang kendalanya adalah harga gitu kan belinya. Seperti GeNose ini kan pengembangan ini kan, ini kan masih butuh pengembangan lebih lanjut ya untuk mengatakan bahwa dia memang bisa men-*detect* virus itu gitu loh karena ini kan..

(tidak menggunakan mic)

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Iya dan Swab Antigen *nggak* standar WHO kan Pak?

DIRUT PT BIO FARMA:

Iya. Untuk untuk yang PCR Test ini memang itu minimal 7 hari biasanya ya, cuma kebijakan masing-masing.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Sekarang kita terbang 3 hari.

DIRUT PT BIO FARMA:

Yang per hari itu rapid sebenarnya ya karena masa masa inkubasi dari Virus itu.

KETUA RAPAT:

Pak Dirut kembali ke nomor 9, apakah ini realistis untuk dilaksanakan dari keinginan forum ini terutama dari Pak Andre?

F-PG (NUSRON WAHID):

Pak Pimpinan.

Saya mendukung usulan Pak Andre karena memang GeNose lebih murah tapi itu dimasukkan di catatan *nggak* di forum ini. Kenapa *nggak* di forum ini? Saya paham posisinya karena Pak Honest, Kimia Farma, maupun Indofarma ini jual alat antigen bukan jual GeNose.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Mereka juga.

F-PG (NUSRON WAHID):

Kalau kita meminta untuk membatasi Antigen berarti sama mematikan pasar.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Nah salah, ini *nggak* lengkap.

Saya menginformasikan anak perusahaan Indofarma juga menguasai GeNose di Bandara dan di Stasiun KAI, jadi mereka jualan Antigen dan GeNose, jadi tidak mematikan. Jadi saya ingin meluruskan Gus Nusron yang saya ingin sampaikan Bio Farma bisa ya Bio Farma bisa berbicara dengan AP I dan AP II seperti KAI, KAI itu tidak dibatasi, penumpangnya boleh pilih GeNose boleh pilih Antigen atau pilih PCR. Nah maksud saya di bandara seperti Stasiun KAI, silahkan penumpang memilih secara bebas.

KETUA RAPAT:

Nggak, maksud saya itu apakah ke BUMN-BUMN Farmasi atau ke Angkasa Pura Pak?

F-PG (NUSRON WAHID):

Ini ke otoritas bandara Pak.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Itu diajak bicara, diajak bicara mas Bimo.

KETUA RAPAT:

Oh ya, catatan saja kalau diajak bicara.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Kan ini sinergi BUMN.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Kalau soal itu lebih bagus kita aja yang panggil atau mempersurat kepada Kementerian BUMN maupun Angkasa Pura, ini *nggak* perlu ditambahin.

KETUA RAPAT:

Oke masukkan ke catatan. Saya kira ide bagusnya Pak Andre kita akomodir di catatan untuk RDP dengan.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Menteri BUMN.

KETUA RAPAT:

Angkasa Pura juga.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Angkasa Pura I dan II dipanggil.

KETUA RAPAT:

Penerbangan juga, Kementerian BUMN juga. Maka dengan berakhirnya kesimpulan yang ke-9 kita masuk ke kesimpulan ke-10 bahwa

9. Komisi VI meminta kepada PT Bio Farma, Kimia Farma, dan Indofarma untuk mensosialisasikan, ini penegasan yang yang rapat dahulu, tetap berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi Covid-19 kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan keikutsertaan dalam kegiatan vaksinasi nasional termasuk 3 M dan 5 M-nya Pak, tolong dibantu lagi Pak itu. Itu penting jadi tidak hanya vaksinnya, tapi pentingnya 3 M dan 5 M.

Selanjutnya di kesimpulan Nomor 10.

10. Untuk menjawab secara tertulis dari pertanyaan-pertanyaan yang penting-penting tadi sampai yang tidak penting ya dalam jawaban tertulis dan diserahkan kepada Sekretariat Komisi VI dalam waktu yang 10 hari.

(RAPAT:SETUJU)

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

3 M, 5 M Pimpinan *nggak* pakai masker.

F-PG (NUSRON WAHID):

Tambah satu Pak tidak hanya 3 M, 5 M, 2 M Makasih Mas gitu.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada saudara Direktur PT Bio Farma (Persero) dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Direktur PT Kimia Farma Tbk, dan juga saya ucapkan terima kasih pada Direktur PT Utama Indofarma Tbk beserta jajarannya.

Atas nama Pimpinan Komisi VI kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada saudara-saudara dan kawan-kawan Anggota Komisi VI yang telah mengikuti rapat sampai sore hari ini dan akan berlanjut dengan rapat lagi dengan PT PLN (Persero) dan perhatiannya mengikuti rapat sampai selesai kesimpulan yang sudah kita putuskan secara bersama-sama.

Dengan demikian rapat kami tutup.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.03 WIB)

Jakarta, 25 Mei 2021
a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

DEWI RESMINI, S.E., M.Si.
NIP.197104071992032001